



**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN
PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI
MBS DI SD NEGERI KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

**OLEH
DALLA FIRMAN
NIM : 2002011003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Dalla Firman, NIM: MPI. 2002011003, judul: **PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI MBS DI SD NEGERI KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 25 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Asmendri. S. Ag. M. Pd
NIP. 197008252000031001

Pembimbing Pendamping








Dr. Devi Aisyah, M. Ag
NIP. 19740604 200003 2 002


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Dalla Firman, NIM: MPI. 2002011003, judul: **PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI MBS DI SD NEGERI KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal
1	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd NIP. 196609141992032003	Ketua Sidang	 18-8-22
2	Dr. Asmendri, S.Ag., M.Pd NIP. 19700825 200003 1 001	Pembimbing Utama	 18-8-22
3	Dr. Devy Aisyah, M. Ag NIP. 19740604 200003 2 002	Pembimbing Pendamping	 18-8-22
4	Dr. Abhandamra, M.Ag NIP. 196904041997031003	Ketua Penguji	 17-8-2022
5	Dr. Elda Herlina, M. Pd NIP. 197403202008012011	Anggota Penguji	 17-8-2022

Batusangkar, 18 Agustus 2022
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Mahmud Yunus Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 196609141992032003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dalla Firman

NIM : 2002011003

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI MBS DI SD NEGERI KECAMATA GUNUNG TALANG**, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hal terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



DALLA FIRMAN
NIM. 2002011003

ABSTRAK

DALLA FIRMAN. NIM. 2002011003, judul Tesis “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah terhadap Implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang”. Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tentang implementasi MBS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah adalah faktor yang mempengaruhi implementasi MBS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y), (2) pengaruh peran komite sekolah (X_2) terhadap Y , (3) pengaruh X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe *ex-post facto*. Populasi penelitian adalah guru SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sebanyak 284 orang. Sampel penelitian dipilih dengan teknik stratified propotional random sampling yang berjumlah sebanyak 74 orang guru. Instrumen penelitian adalah angket mengenai kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan implementasi MBS, dengan menggunakan skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 20.0.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara X_1 dan Y dengan nilai hitung signifikansi $0,031 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara X_2 dan Y dengan nilai hitung signifikansi $0,017 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y dengan nilai hitung signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah merupakan dua faktor secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi MBS di SD Negeri Gugus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Oleh sebab itu diharapkan kepada pihak-pihak terkait supaya memperhatikan kedua faktor tersebut agar implementasi MBS di sekolah dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, Implementasi MBS

ABSTRACT

DALLA FIRMAN. NIM. 2002011003, Thesis title "**The Influence of Principal Leadership and the Role of School Committees on the Implementation of SBM in SD Negeri Kecamatan Gunung Talang**". Islamic Education Management Postgraduate Program at State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar.

This research was motivated by the author's observations at SD Negeri Gunung Talang District, Solok Regency, about the implementation of SBM and the factors that influence it. The principal's leadership and the role of the school committee are factors that influence the implementation of SBM. The purpose of this study was to describe (1) the influence of the principal's leadership (X1) on the implementation of SBM (Y), (2) the influence of the school committee's role (X2) on Y, (3) the effect of X1 and X2 together on Y in SD Negeri Gunung Talang District, Solok Regency.

This type of research is quantitative with ex-post facto type. The population of this research is the teachers of SD Negeri Gunung Talang District, Solok Regency as many as 284 people. The research sample was selected using a stratified proportional random sampling technique with a total of 74 teachers. The research instrument was a questionnaire on the principal's leadership, the role of the school committee, and the implementation of SBM, using a Likert scale. Data were analyzed using SPSS version 20.0.

Based on the data processing, the results are (1) there is a significant effect between X1 and Y with a significant calculated value of $0.031 < 0.05$, so H_a is accepted and H_0 is rejected. (2) there is a significant effect between X2 and Y with a significant calculated value of $0.017 < 0.05$, so that H_a is accepted and H_0 is rejected. (3) there is a significant effect between X1 and X2 together on Y with a significant calculated value of $0.000 < 0.05$, so H_a is accepted and H_0 is rejected. The results of these findings can be concluded that the leadership of the principal and the role of the school committee are two factors that together influence the implementation of SBM in the Gugus Elementary School, Gunung Talang District, Solok Regency. Therefore, it is hoped that related parties should pay attention to these two factors so that the implementation of SBM in schools can run well.

Keywords: **Principal Leadership, Role of School Committees, MBS Implementation**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta rasa syukur dipersembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mendapat pencerahan, pertolongan dan kemampuan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah terhadap Implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang”. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar umat sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya untuk menjalani kehidupan dunia yang bermanfaat dan mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini banyak bimbingan, arahan, motivasi serta kontribusi dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di Pascasarjana IAIN Batusangkar.
2. Ibu Dr. Suswati Hendriani, M.Pd. M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajaran, sekaligus selaku ketua sidang pada ujian *munaqasyah*.
3. Ibu Dr. Hj. Demina, M.Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Bapak Dr. Asmendri, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr.

Devy Aisyah, M. Ag selaku pembimbing 2

5. Bapak Dr. Abhandha Amra, M.Ag, sebagai penguji utama
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah melayani serta memfasilitasi penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Bapak Dr. H. Jamilus, M. Pd, Ibu Dr. Fadriati, M. Pd dan Ibu Erlina roza, S. Pd, yang telah bersedia menjadi falidator dalam penelitian ini
8. Kepala Sekolah dan semua guru SD Negeri Kecamatan Gunung Talang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam menulis tesis ini.
9. Istri tercinta Dewi Fetri Melya, anak-anak serta keluargaku tersayang yang selalu menjadi motivator dan penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak membantu dan mendukung segala kegiatan yang peneliti lakukan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT, semoga segala partisipasi dan kontribusi semua pihak kepada peneliti selama ini diterima menjadi amal jariyah dan mendapatkan berkah dan pahala yang setimpal dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, saran dan kritik peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan.

Batusangkar, Juli 2022
Peneliti

Dalla Firman
Nim. 2002011003

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penulisan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	10
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	16
3. Peran Komite Sekolah.....	22
B. Penelitian yang Relevan.....	30

C.	Kerangka berfikir.....	34
D.	Hipotesis	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
A.	Jenis penelitian.....	37
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C.	Populasi dan sampel.....	37
1.	Populasi.....	37
2.	Sampel.....	39
D.	Pengembangan Instrumen.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Teknik Analisa Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A.	Deskripsi Data	56
1.	Kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.....	56
2.	Peran komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.....	57
3.	Implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.....	59
B.	Pengujian Persyaratan Analisis.....	60
1.	Uji Normalitas.....	60
2.	Uji Linearitas.....	61
3.	Uji Multikolonieritas.....	61
C.	Pengujian Hipotesis.....	62
1.	Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	62
2.	Pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	63

3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	64
D. Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data awal kegiatan MBS, Kepemimpinan kepala sekolah Komite Sekolah.....	4
Tabel 3.1	Populasi Peneliti.....	37
Tabel 3.2	Ukuran Sampel Penelitian.....	40
Tabel 3.3	Penegembangan Instrumen Penelitian.....	43
Tabel 3.4	Validitas angket penelitian.....	48
Tabel 3.5	Interpretasi Nilai r.....	51
Tabel 3.6	Reability instrument penelitian.....	52
Tabel 3.7	Nilai r.....	53
Tabel 4.1	Distribusi frekuensi kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	56
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi peran komite sekolah SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	58
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi peran komite sekolah SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	59
Tabel 4.4	Uji normalitas.....	60
Tabel 4.5	Uji linearitas.....	61
Tabel 4.6	Uji multikololinearitas.....	62
Tabel 4.7	Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS.....	63
Tabel 4.8	Pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS.....	64
Tabel 4.9	Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Komite Sekolah.....	29
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir.....	35

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Distribusi frekuensi kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	57
Diagram 4.2	Distribusi frekuensi peran komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	58
Diagram 4.3	Distribusi frekuensi implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	77
Lampiran 2	Falidasi Angkaet.....	75
Lampiran 3	Kisi-Kisi Angket.....	88
Lampiran 4	Angket penelitian.....	97
Lampiran 5	Validasi Instrumen Kepemimpinan Kepala Sekolah.	104
Lampiran 6	Validasi Instrumen Peran Komite Sekolah.....	106
Lampiran 7	Validasi Intrument MBS.....	108
Lampiran 8	Reliability instrument Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	109
Lampiran 9	Reliability instrument Peran Komite Sekolah.....	111
Lampiran 10	Reliability instrument MBS.....	113
Lampiran 11	Uji Normalitas.....	115
Lampiran 12	Uji Linearitas.....	116
Lampiran 13	Uji Multikolonieritas.....	117
Lampiran 14	Uji Hipotesis.....	118

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) merupakan konsep yang diberikan kepada sekolah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, untuk mewujudkan hal ini kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan penyelenggara pendidikan harus tetap dijalin dengan baik. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah merupakan suatu bentuk perjuangan atau barisan yang kokoh sebagai landasan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Asshof ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” ((Q.S. Asshof: 4)

Pendidikan yang bermutu merupakan rencana strategis pembangunan nasional tahun 2000-2004, hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2000. Sekaligus merupakan dasar penetapan MBS di Indonesia. Pengelolaan satuan pendidikan, baik pada anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 tentang sistim pendidikan nasional.

Implementasi MBS tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan penerapan MBS di sekolah. Suprihatin, 2017, mengemukakan beberapa indikator keberhasilan implementasi MBS diantaranya keefektifan proses pembelajaran, kuatnya kepemimpinan sekolah, keefektifan pengelolaan sumber daya manusia, *team*

work, kepemilikan budaya mutu sekolah, kemandirian sekolah, partisipasi, transparansi, responsif dan antisipatif. Dari indikator keberhasilan MBS yang dikemukakan tampak bahwa MBS dapat dikatakan akan mencapai keberhasilan jika pada implementasinya didukung oleh kepemimpinan dan kerjasama antar penyelenggara pendidikan yang ada pada sekolah tersebut. Selajen dengan hal tersebut, Patras, Iqbal, Papat, Rahman (2019) menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi MBS meliputi dukungan kepala sekolah, guru, pendanaan, komitmen, tanggungjawab, kualifikasi, perencanaan, dan akuntabilitas.

Merujuk pada keberhasilan implementasi MBS yang telah dikemukakan, tampak bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam mencapai suatu tujuan memiliki peran penting. Hasibuan, (2018, p. 170) mengemukakan kepemimpinan merupakan cara bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku kelompok yang dipimpinnya agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Kepala sekolah harus bisa melakukan pendekatan terhadap bawahannya secara persuasif agar kelompok tersebut dapat diajak bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tanpa adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepala sekolah dalam memimpin sekolah dapat diasumsikan tidak terjadinya hubungan, dialog, dan keikutsertaan yang baik antara pemimpin dengan bawahannya. Kerjasama yang buruk antara pemimpin sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang ada, akan membawa efek yang tidak baik terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan yang ada disekolah tersebut.

Kepala sekolah adalah tuntunan bagi personil sekolah lainnya. Kepala sekolah harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam memajukan pendidikan pada sekolah yang dipimpin termasuk dalam implementasi MBS. Luasnya kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen dapat memberikan perhatian kepada seluruh komponen yang berkaitan dengan kemajuan dan keberlangsungan pendidikan, salah satunya memberikan perhatian kepada lingkungan sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalin kerjasama yang baik dengan guru dan masyarakat

sekitar akan menunjang kegiatan pendidikan. Mulyasa, (2013, p. 97) menjelaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai *educator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *innovator* dan *motivator*. Fungsi dan peran kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin dalam arti yang sempit, namun juga pemimpin yang dapat meningkatkan kemampuan dan memberi contoh yang baik terhadap bawahannya. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Seriyanti, Nela., Sarwani Ahmad., (2021) membuktikan bahwa adanya hubungan yang substansial antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap penerapan MBS, artinya, jika kepemimpinan kepala sekolah baik maka penerapan MBS di sekolah tersebut juga akan ikut membaik.

Implementasi MBS juga dipengaruhi oleh kerjasama yang dijalin oleh pihak sekolah dan masyarakat melalui komite sekolah. Secara resmi keberadaan komite sekolah tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk serta memiliki tugas membantu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan arahan, dukungan, serta pengawasan pada satuan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Pantjastuti, (2008) menjelaskan bahwa komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan sebagai mediator. Pelaksanaan MBS juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP yang meliputi komponen kurikulum dan pembelajaran, siswa, guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya lingkungan sekolah.

Merujuk pada teori yang disampaikan diatas, dengan jelas bahwa komite sekolah adalah pihak yang harus dilibatkan dalam diskusi, kerjasama, serta memberi arahan dan pandangan dalam memajukan pendidikan yang berlangsung di sekolah, termasuk dalam kegiatan MBS. Hal ini sesuai dengan penelitian Siregar, (2020) bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komite sekolah terhadap efektivitas MBS. Kepala sekolah tidak dapat memutuskan secara sepihak keputusan yang diambil, harus

melalui musyawarah dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat dan orang tua peserta didik. Demikian juga dalam menuju MBS kepala sekolah hendaknya memiliki kerjasama yang baik dengan komite sekolah, sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dengan MBS merupakan keputusan yang terbaik dalam memajukan pendidikan di sekolah yang dipimpin.

Sebagai lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Gunung Talang telah melaksanakan MBS dalam kegiatan pendidikan. SD Negeri Kecamatan Gunung Talang juga memiliki komite sekolah sebagai wadah diskusi antara pihak sekolah dan masyarakat. Sebagai bahan untuk memperoleh data dan informasi tentang permasalahan yang terjadi dalam implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, peneliti mendistribusikan pertanyaan-pertanyaan berupa instrumen yang dikembangkan dari indikator implementasi MBS sebagai data awal. Dari hasil pendistribusian instrumen tersebut dapat dilihat bahwa:

Tabel 1.1. Data awal dari kegiatan MBS, kepemimpinan kepala sekolah, dan peran komite sekolah

Variabel	Indikator	Persentase Pelaksanaan
MBS	Managemen kurikulum dan pengajaran	95%
	Managemen tenaga kependidikan	85%
	Managemen kesiswaan	85%
	Managemen keuangan	80%
	Managemen sarana dan prasarana	75%
	Managemen hubungan dengan masyarakat	65%
	Managemen layanan khusus	50%
Rata-Rata		76,42%
Kepemimpi	Educator	80%

nan	Manager	80%
	Administrasi	80%
	Supervisi	80%
	Leader	80%
	Innovator	75%
	Motivator	85%
Rata-Rata		80%

(sumber: distribusi instrument di SD Negeri 41 Air Tumbuk Kecamatan Gunung Talang)

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa temuan permasalahan juga terjadi terhadap kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung. Pertama, masih terdapat personil sekolah yang belum melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Komunikasi yang baik belum terjalin sepenuhnya baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan peserta didik, maupun dengan tenaga kependidikan lainnya. Wawancara dengan salah seorang guru (SW, 37 tahun) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang menunjukkan bahwa ketidak tahuannya tentang informasi jelas mengenai kegiatan sekolah pada tiap semester. Hal ini menimbulkan suasana sekolah yang terkesan kaku dan kurang ramah, sehingga akan memberi dampak terhadap implementasi MBS yang dijalankan di sekolah tersebut. Persoalan lain tampak dari belum terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif, dari segi bimbingan siswa dan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Faktanya, 85% tugas peserta didik, belum diberikan nilai oleh guru kelas.

Kedua, masih belum terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar dengan baik. Wawancara dengan warga (RF, 51 tahun) menyatakan bahwa, kurangnya tegur sapa antara pihak sekolah dan masyarakat. Kemudian, (WN, 43 tahun) juga menyatakan bahwa sekolah tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Buruknya Kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar akan berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan implementasi

MSB. Seperti yang disampaikan oleh Pratiwi, Doni, (2019) bahwa salah satu penentu ketercapaian visi dan misi sekolah adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Ketiga, belum tercipta musyawarah yang baik antara komite dan beberapa SD Negeri di Kecamatan Gunung Talang. Dari catatan atau berita acara pertemuan yang dilakukan antara SD Negeri 41 Air Batumbuk dan komite sekolah, tercatat hanya terdapat dua kali kunjungan komite dalam dua semester terakhir. Pada SD lain di Kecamatan Gunung Talang, juga menunjukkan adanya kritikan dari orang masyarakat atau wali murid tentang keberlangsungan pendidikan. Di SD Negeri 17 Cupak misalnya, wali murid mengeluhkan kurang baiknya kegiatan belajar yang diberikan kepada peserta didik seperti pemberian tugas yang menumpuk dalam kurun waktu yang singkat, keluhan ini disampaikan melalui pesan singkat whats up, Kritikan ini muncul sebagai dampak kurangnya musyawarah antara pihak sekolah dan komite sekolah. Kurangnya musyawarah antara kedua belah pihak tentu menunjukkan bahwa komite sekolah belum berperan secara baik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan sehingga berakibat kepada pencapaian manajemen sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak sangat mendukung ketercapaian MBS di suatu sekolah. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi MBS diantaranya kepemimpinan, guru, pembiayaan, sumber daya manusia, efektivitas proses pembelajaran, kemandirian sekolah, serta kerjasama dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

2. Masih terdapatnya kepemimpinan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang belum menjalankan peran berdasarkan tugas masing-masing di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.
3. Masih terdapatnya pihak sekolah yang belum menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan orang tua siswa di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.
4. Belum berperannya komite sekolah yang telah dibentuk sesuai dengan tugas dan kewajiban yang seharusnya di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.
5. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka permasalahan akan dibatasi menjadi pertama pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, kedua, peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, ketiga, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang?
2. Apakah komite sekolah berpengaruh terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang?
3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan pertama, dalam pengembangan teori mengenai kepemimpinan kepala sekolah, bahwa kepala sekolah harus mampu mengembangkan potensi sebagai edukator, pemimpin, pelaksana, dan motivator dalam implementasi MBS. Kedua, penelitian ini bertujuan dalam pengembangan teori mengenai peran komite sekolah. Ketiga, hasil penelitian diharapkan memberi sumbangsih terhadap pengetahuan keberhasilan manajemen berbasis sekolah sehingga dapat dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah, dimuatnya hasil penelitian yang telah melalui proses diskusi dan saran-saran yang diberikan oleh tim pembimbing pada jurnal nasional terakreditasi dan terindex sinta 5.

G. Defenisi Operasional

1. MBS adalah pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan yang lebih luas ditingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Nilai keberhasilan MBS di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu *Satu*, meningkatnya jumlah siswa yang mendapat pelayanan, *Kedua*, pelayanan pendidikan menjadi lebih baik, *Ketiga*, berkurangnya tingkat tinggal kelas,

Keempat, penyusunan program sekolah melibatkan masyarakat, *Kelima*, berbuat adil dalam menyelenggarakan pendidikan misalnya dalam menentukan biaya tidak pukul rata melainkan berdasarkan kesanggupan ekonomi, *Keenam*, meningkatnya keterlibatan orang tua dalam penyusunan program sekolah, *Ketujuh*, iklim dan budaya kerja semakin membaik, *Kedelapan*, semakin membaiknya kesejahteraan guru dan pegawai, *Kesembilan*, penyelenggaraan pendidikan secara demokratis.

2. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara kepala sekolah dalam mempengaruhi, menjalankan tugas, melakukan pendekatan, dan komunikasi sebagai pemimpin guru dan tenaga kependidikan yang tergabung di sekolah yang dipimpin dalam mencapai tujuan, secara lebih luas kepala sekolah memiliki peran sebagai: *Educator, Maneger, Adminstrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator*
3. Peran komite sekolah adalah wadah diskusi dan musyawarah antara pihak sekolah, masyarakat dan orang tua peserta didik yang berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan sebagai mediator dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan yang ada di sekolah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Berbasis Sekolah

a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *school Based Management* adalah suatu kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyasa, (2012, p. 11) menyampaikan bahwa MBS merupakan suatu teori yang menganjurkan kemandirian kepada sekolah dalam mengambil keputusan atau kebijakan meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan bisa berjalan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta terjalinnya kerja sama yang baik antara sekolah, masyarakat serta pemerintah. Dengan kata lain, MBS adalah suatu konsep otonomi sekolah dalam pengelolaan kegiatan pendidikan untuk menuju keberhasilan dan selaras dengan kehidupan masyarakat sekitar.

MBS adalah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan kegiatan sekolah. Departemen Pendidikan Nasional dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah (2004: 24) menyebutkan bahwa salah satu langkah alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan akan dapat diwujudkan melalui MBS. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian kewenangan kepada sekolah dalam menentukan kebijakan atau keputusan ditingkat sekolah. Kewenangan yang diberikan kepada sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut tentu tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat dan program pendidikan nasional.

Menurut Machali, Imam dan Hidayat, (2016, p. 57) cara untuk mencapai sekolah yang efektif dan efisien serta produktif adalah dengan menerapkan MBS. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang seharusnya, sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang diterapkan. Sekolah produktif, mampu menghasilkan peserta didik yang baik secara akademik serta dalam bidang ekstrakurikuler. Potensi

peserta didik terus diaasah agar memperoleh pengetahuan serta kecerdasan IQ ataupun EQ. dari teori yang dikemukakan, tampak bahwa implementasi MBS adalah dalam rangka mengasah dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan baik sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya. Dengan adanya MBS, sekolah diberi kewenangan dalam menentukan kegiatan pendidikan yang berlangsung, namun tetap berdasar pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberlangsungan pendidikan dengan penerapan MBS tidak terlepas dari hubungan masyarakat dan situasi yang ada di sekolah tersebut.

b. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Pengimplementasian MBS adalah meningkatkan kualitas dan mutu sekolah agar menjadi lebih baik. Nurkolis, (2006, p. 23) menyatakan tujuan diterapkannya MBS adalah untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, kualitas baik dari segi kualitas pelaksanaan pembelajaran, penerapan kurikulum, maupun kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat terlihat dari guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, tentu terdapat kriteria yang harus dicapai oleh penerapan MBS, agar pelaksanaan MBS pada suatu sekolah dapat dikatakan berhasil.

Pencapaian MBS yang telah ditetapkan harus didukung dengan komponen-komponen implementasi MBS itu sendiri. Rohiat, (2010, p. 21) menyatakan terdapat tujuh komponen manajemen sekolah yang meliputi yaitu:

- 1) Manajemen kurikulum, yakni manajemen yang berkaitan dengan penerapan kurikulum yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru dan siswa.
- 2) Manajemen program pembelajaran dan pengajaran, yakni manajemen yang berkaitan dengan PBM (Proses Belajar Mengajar) di sekolah. PBM yang berlangsung diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh guru, mulai dari persiapan perencanaan dan perangkat pembelajaran, kegiatan

belajar, materi, media dan komponen lainnya. Selanjutnya perencanaan yang telah diatur diterapkan dalam kegiatan belajar. Hasil dari kegiatan belajar tersebut diperlukan evaluasi sehingga diketahui kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam PBM yang dilaksanakan.

- 3) Manajemen tenaga kependidikan, yakni manajemen yang berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pendidikan. Ketersediaan SDM sangat mempengaruhi keberlangsungan implementasi MBS. SDM yang baik tentu dapat menerapkan MBS dengan baik pula sehingga mencapai tujuan implementasi MBS.
- 4) Manajemen kesiswaan, yakni berkaitan dengan pengaturan peserta didik yang ada di sekolah. Manajemen kesiswaan berkaitan juga dengan jumlah peserta didik baru dan jumlah peserta didik yang menamatkan pendidikan di sekolah tersebut.
- 5) Manajemen keuangan, yaitu pengaturan pendanaan yang ada di sekolah. Dalam implementasi MBS harus jelas pembiayaan dan alokasi dana yang tersedia di sekolah. Hal ini bertujuan agar perencanaan yang telah ditetapkan berjalan dengan semestinya.
- 6) Manajemen sarana dan prasarana, yakni pengelolaan ketersediaannya di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasana bertujuan untuk mendukung kegiatan PBM sehingga harus jelas pengalokasiannya.
- 7) Manajemen hubungan masyarakat, yakni pengelolaan komunikasi antara kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan atau penyelenggara pendidikan dengan masyarakat di sekitar. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat harus terjalin dengan baik agar tercipta komunikasi yang baik pula.

Sejalan dengan hal tersebut, Mulyasa, (2012, p. 40) mengemukakan tujuh komponen dalam implementasi MBS antara lain:

- 1) Manajemen kurikulum dan program pengajaran

Pada pelaksanaannya, manajemen kurikulum dan program pengajaran terdiri atas proses perencanaan, pelaksanaan, lalu akhirnya terdapat penilaian kurikulum. Departemen Pendidikan Nasional sejatinya telah

melakukan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum. Sekolah bertugas dan berwenang dalam pembuatan kurikulum muatan lokal yang diselaraskan dengan kebutuhan lingkungan setempat. Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dengan tujuan agar peserta didik mengenal lingkungannya dan melestarikan SDA, kualitas sosial, serta kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, pembangunan regional, dan pembangunan lokal.

2) Manajemen tenaga kependidikan

Pada poin kedua ini berkaitan dengan manajemen guru dan personil lainnya dalam sekolah tersebut. Implementasi MBS juga mengatur mengenai perencanaan dan pembinaan yang berhubungan dengan pegawai, dan promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga hasilnya sesuai dengan harapan.

3) Manajemen kesiswaan

Fungsi Manajemen kesiswaan untuk mengatur kegiatan siswa agar berjalan dengan baik mulai dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), kegiatan pembelajaran, bimbingan konseling dan pembinaan siswa. Dalam PPDB harus persiapan mulai dari perencanaan seperti jumlah penerimaan, tim penerimaan (kepanitiaan), serta pembagian kelas, kemudian pelaksanaan yang berkaitan dengan teknis dilapangan, serta evaluasi kegiatan PPDB itu sendiri. Demikian juga dengan bimbingan konseling dan pembinaan siswa harus jelas siapa dan bagaimana pelaksanaannya sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar.

4) Manajemen keuangan dan pembiayaan

Manajemen keuangan dan pembiayaan haruslah dikelola dengan baik. Pembiayaan dapat dikelompokkan dari sumber pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dalam pembiayaan harus diketahui biaya pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, operasional, dan barang habis pakai. Sementara itu pembiayaan juga dikelola dengan jelas mengenai pembiayaan

pembangunan, dan pembelian sehingga pembiayaan dapat teralokasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

5) Manajemen sarana dan prasarana

Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah, seperti ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar mengajar, kursi, meja, ruang kelas, Gedung dan sebagainya. Selain itu, dalam menunjang kegiatan pendidikan, keberadaan taman, kebun, kolam juga merupakan fasilitas yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan pendidikan.

6) Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

Teradinya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan sekolah perlu diciptakan hubungan yang baik. Hubungan ini nantinya akan membangun persepsi positif di masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang harus ditempuh oleh generasi penerus bangsa. Keberadaan sekolah harus diketahui oleh masyarakat dari berbagai sumber seperti radio, surat kabar dan lain sebagainya.

7) Manajemen layanan khusus

Manajemen layanan khusus berkaitan dengan keberadaan pelayanan penunjang dalam kegiatan pendidikan, seperti adanya UKS bagi siswa yang membutuhkan serta ruang bimbingan konseling sehingga kenyamanan dapat dirasakan oleh murid ketika berada di sekolah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurkolis, (2006, p. 271) tentang kriteria yang harus dicapai dalam implementasi MBS yang setidaknya terdapat Sembilan kriteria, yakni:

- 1) Peningkatan jumlah siswa yang mendapat pendidikan, yakni dalam implementasi MBS dikatakan mencapai keberhasilan apabila peserta didik mengalami peningkatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah dimana diterapkannya MBS menjadi pilihan utama bagi peserta didik untuk menempuh pendidikan.
- 2) Layanan pendidikan yang lebih berkualitas, yakni adanya pelayanan pendidikan yang berkualitas, seperti pelayanan terhadap peserta didik

dengan segala kebutuhannya, dan pelayanan terhadap penyelenggara pendidikan.

- 3) Turunnya tingkat tinggal kelas dan semakin baiknya produktivitas sekolah, yaitu peserta didik naik ke level yang lebih tinggi setiap tahunnya. Peserta didik memperoleh pembelajaran yang berkualitas sehingga peluang tinggal kelas sangat kecil.
- 4) Pendidikan semakin baik penyelenggaraannya, yaitu kegiatan pendidikan dari waktu ke waktu terlihat semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBS mengalami keberhasilan jika pendidikan yang ada di sekolah semakin baik.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan yang semakin adil, yakni kegiatan yang berlangsung di sekolah dilaksanakan secara merata. Tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Sekolah juga memberi fasilitas yang sama terhadap penyelenggaraan kegiatan.
- 6) Semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat yang dalam pengambilan keputusan di sekolah, yakni adanya diskusi antara penyelenggara pendidikan di sekolah dengan masyarakat. Yang biasa disebut dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat (termasuk wali peserta didik) dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap keberlangsungan pendidikan.
- 7) Budaya kerja dan iklim di sekolah semakin baik, yakni adanya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. siswa, pendidik dan tenaga kependidikan merasakan suasana yang menyenangkan di lingkungan sekolah, jauh dari pertikaian dan perselisihan diantara penyelenggara pendidikan.
- 8) Kesejahteraan guru dipengaruhi oleh sumbangan pemikiran, tenaga dan dukungan dana dari masyarakat luar.
- 9) Demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni adanya prinsip yang demokratis dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Penyelenggara pendidikan memiliki kesempatan yang sama baik dalam menyampaikan

pendapat ataupun dalam memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan pengembangan profesi.

Merujuk pada kriteria implementasi MBS, dapat dikatakan bahwa keberhasilan MBS akan tercapai apabila terciptanya komponen yang menjadi dasar penerapan MBS, yaitu manajemen kurikulum dan pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Disamping itu, dalam pengelolaan yang melibatkan MBS dikatakan baik apabila meningkatnya jumlah peserta didik, meningkatnya layanan pendidikan, turunya angka tinggal kelas peserta didik, penyelenggaraan pendidikan yang semakin baik dari waktu ke waktu, penyelenggaraan pendidikan yang semakin adil, adanya keterlibatan orang tua dan masyarakat, terciptanya iklim sekolah dan budaya kerja yang baik, adanya sumbangan pikiran dari orang tua dan masyarakat, serta adanya demokrasi dalam kegiatan pendidikan. Beberapa karakteristik dalam keberhasilan penerapan MBS tentu akan tercapai apabila terdapat kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Pihak sekolah yang meliputi kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat merupakan pihak yang terlibat dalam memajukan MBS di sekolah.

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan adalah cara yang digunakan agar orang lain dapat mengikutinya. Menurut Wahjosumidho, (2005, p. 17) kepemimpinan adalah perilaku seseorang yang berbentuk sifat dalam memberi pengaruh kepada orang di sekitarnya agar mau melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu, seiring dengan itu (Asmend & Ri, n.d.) mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu proses yang memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain agar dapat menjalankan proses yang diinginkan oleh pemimpinnya. Seseorang yang menjadi pemimpin hendaknya memiliki

prilaku dan kepribadian yang baik, agar dapat dapat menjadi contoh bagiorang lain. Prilaku dan kepribadian yang baik tentu akan menimbulkan rasa percaya kepada pemimpin tersebut untuk dijadikan panutan dan contoh dalam bertindak. Pemimpin yang baik mampu memberi pengaruh dengan cara memberikan pendekatan-pendekatan tanpa memberikan tekanan sehingga orang yang diberi pendekata mengerjakan apa yang diperintahkan dengan senang hati, dan tanpa terpaksa sehingga memberikan hasil yang maksimal terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pemimpin yang baik juga mampu membangun kerjasama dengan bawahannya. Pemimpin tidak harus selalu memberikan perintah, namun mampu memberikan sumbangsih berupa kerjasama terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan menjalankan arti kepemimpinan yang sesungguhnya tentu tujuan yang hendak dicapai dapat diraih dengan hasil yang maksimal.

Susanto, (2018, p. 5) menegaskan bahwa kepemimpinan sejatinya adalah seni dan ilmu yang mempengaruhi dan membujuk orang lain dengan membuat ketaatan, keyakinan, rasa segan, dan kerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Pemimpin menjalankan perannya dalam meyakinkan orang lain dengan menunjukkan sikap dapat dipercaya. Dengan adanya kepercayaan orang lain kepada pemimpin maka akan tumbuh sikap patuh dan setia dari orang lain. Dengan adanya kepatuhan dan kesetian dari bawahan, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin telah memberikan berpengaruh terhadap orang lain dalam mencapai tujuan. Pemimpin hendaknya menunjukkan sikap bekerjasama tidak hanya memerintah, sehingga bawahan merasa dihargai oleh seorang pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa, baik pemimpin maupun orang yang dipimpin akan berusaha mewujudkan tujuan yang direncanakan bersama.

Merujuk pada arti kepemimpinan diatas, kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan cara atau gaya dalam mengayomi orang yang bekerja bersamanya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, memberikan motivasi, dan kerjasama demi tercapainya pendidikan yang memiliki kualitas tinggi. Priansa, (2017, p. 36) menjelaskan bahwa kepala sekolah bagian dari

tenaga fungsional guru memiliki peranan penting dan tanggungjawab untuk menjadi pemimpin di sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kepala sekolah berasal dari guru yang juga menerima dan mengerjakan perintah-perintah sebagai guru. Kepala sekolah tentu paham dengan pekerjaan, tanggungan, serta tugas yang harus dilaksanakan seorang guru. Tidak hanya guru, kepala sekolah juga memimpin tenaga kependidikan lainnya seperti bagian administrasi dan pustakawan yang akan memberi pertanggung jawaban kepada kepala sekolah. Kemudian membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Adanya interaksi yang baik antara pemimpin dan orang yang dipimpin tentu akan menciptakan satu suara untuk mencapai tujuan yang sama yakni memajukan pendidikan di sekolah yang dipimpin.

Wahjosumidho, (2005, p. 110) menjelaskan bahwa kepala sekolah yang baik, harus memiliki karakter yang mencirikan kepemimpinan yang baik yaitu, keahlian dasar, kepribadian, pengetahuan profesional, pengetahuan administrasi, pengalaman, diklat keterampilan profesional, dan pengawasan. Karakter yang dimaksudkan merupakan cerminan dari pemimpin yang baik. Kepribadian yang dimiliki kepala sekolah tentu kepribadian yang tegas, tidak memihak, namun bersahabat dengan bawahannya. Kepala sekolah harus memiliki keahlian dasar tentang tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah mampu memahami karakter anggotanya. Sebelum menduduki jabatan, kepala sekolah telah melalui diklat dan pengetahuan professional, dengan demikian kepala sekolah telah memiliki kemampuan administrasi dan mampu memberikan pengawasan kepada orang-orang yang dipimpinnya di sekolah tersebut.

Dari teori yang dikemukakan diatas, maka tampak bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan tugas yang harus dijalankan dengan memiliki keterampilan dalam mempengaruhi, mengajak, berinteraksi, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam memajukan pendidikan di sekolah yang dipimpin. Kepala sekolah harus menunjukkan sikap

profesional, tidak memihak, bisa dipercaya, berpengetahuan, dan berkarakter sehingga dapat dijadikan panutan dan disegani oleh guru dan tenaga kependidikan.

b. Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah model bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itu, kepala sekolah tentu memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah tercantum didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, yaitu terdapat lima kompetensi kepala sekolah yang harus terus ditingkatkan yaitu:

- 1) Kompetensi kepribadian, yakni berhubungan dengan sikap kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi guru dan tenaga kependidikan.
- 2) Kompetensi managerial, yakni kepala sekolah harus bisa mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah, termasuk kegiatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
- 3) Kompetensi kewirausahaan, yakni kepala sekolah memiliki keterampilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung.
- 4) Kompetensi supervisi, yakni memiliki kemampuan dalam penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik.
- 5) Kompetensi sosial, yakni kemampuan kepala sekolah dalam membangun hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sekitar. Dengan adanya kompetensi sosial akan tercipta komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pemerintah dan masyarakat.

Teori lain yang berkaitan dengan kompetensi pemimpin disampaikan oleh Luhans, (2006, p. 644) adalah:

- 1) Dorongan atau motivasi; kepala sekolah hendaknya memiliki dorongan dan motivasi yang baik dalam memimpin sebuah sekolah.

- 2) Integritas dan kejujuran; kepala sekolah bekerja dengan baik sesuai dengan jabatan yang telah diamanahkan.
- 3) Kepercayaan diri; kepala sekolah dalam memimpin sekolah harus memiliki rasa percaya diri, percaya akan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 4) Inteligensi; kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya memiliki kemampuan dan keterampilan terhadap tugas yang menjadi tanggungjawab.
- 5) Pengetahuan; kepala sekolah memiliki ilmu yang relevan terhadap tugas dan kewajibannya.
- 6) Kecerdasan emosi; kepala sekolah mampu mengendalikan diri terhadap situasi yang sedang dihadapi.

Berkaitan dengan implementasi MBS, Mulyasa, (2017, p. 126) menyebutkan beberapa kriteria kepala sekolah dalam pencapaian implementasi MBS, yakni:

- 1) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, yaitu kepala sekolah mampu memberikan arahan dan contoh yang baik kepada guru dalam pelaksanaan tugas dalam PBM ataupun diluar PBM.
- 2) Tepat waktu dalam tugas dan kewajiban, yaitu kepala sekolah memiliki disiplin yang baik sehingga menjadi teladan bagi guru dan tenaga kerja yang tergabung dalam satuan pendidikan.
- 3) Menjalin hubungan harmonis tidak hanya dengan penyelenggara pendidikan, namun juga dengan masyarakat sekitar, yaitu pihak sekolah memiliki komunikasi yang baik dengan pihak diluar sekolah khususnya masyarakat sekitar.
- 4) Menrapkan prinsip kepemimpinan dengan baik, yaitu kepala sekolah mengetahui dan memahami bahwa kepemimpinan bukan berarti memberi perintah kepada bawahan, namun pemimpin adalah pihak yang

bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah.

- 5) Mampu bekerja dengan tim, yakni kepala sekolah bersifat luwes, berdiskusi dengan kelompok kerja serta membangun Kerjasama yang baik dalam kelompok tersebut.
- 6) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan menerapkan beberapa kriteria yang telah disebutkan diatas, diasumsikan bahwa kepala sekolah akan mampu memimpin sekolah dan penyelenggara pendidikan yang terlibat didalamnya dalam pencapaian implementasi MBS yang diterapkan disekolah tersebut. Mulyasa, (2003, p. 98) mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila memenuhi fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

- 1) *Eduikator*; menjadi edukator merupakan kemampuan kepala sekolah yang semata-mata tidak hanya menjadi pemimpin, namun juga menjadi pendidik yang dapat di panut oleh guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan.
- 2) *Manager*; menjadi manager berarti kepala sekolah menjadi pengelola, perencana, dan organisator dalam sebuah lembaga pendidikan. Meneger pada hakikatnya memiliki kemampuan seperti mampu bekerjasama, bertanggungjawab, berfikir realistic dan konseptual,
- 3) *Administrator*; menjadi administrator dapat juga dikatakan dengan memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengorganisasikan kegiatan berserta dokumentasinya. Admininstrator tentu akan paham apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan sesegara mungkin.
- 4) *Supervisor*; menjadi supervisor berarti kepala sekolah memiliki peluang untuk mengetahui kemampuan guru dalam PBM. Kemudian, dengan berperan sebagai supervisor, guru akan lebih memperhatikan kesiapan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Supervisi yang dilakukan oleh

kepala sekolah juga berguna untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru dalam implementasi MBS.

- 5) Leader, yakni peran kepala sekolah yang mampu memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah yang dipimpin. Menjadi pemimpin tidak hanya memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh guru, namun juga memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
- 6) Inovator, yakni kepala sekolah memiliki ide-ide baru dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah yang inovatif akan tercermin dari cara dan tindakan saat melaksanakan tugas secara kreatif, disiplin, teladan, objektif dan rasional.
- 7) Motivator, yakni kemampuan kepala sekolah untuk memberikan semangat kerja kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Kepala sekolah menjadi motivator oleh penyelenggara pendidikan dengan memberikan semangat kerja, dorongan dan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan guru dan tenaga kependidikan.

Merujuk kepada beberapa teori yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa menjadi kepala sekolah harus memiliki karakteristik dan kompetensi khusus yaitu, sebagai *edukator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *innovator* dan *motivator*. Kompetensi ini dipilih karena menyampaikan kompetensi yang lebih kompleks dan harus dimiliki oleh kepala sekolah.

3. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan dewan perwakilan masyarakat serta orang tua siswa dalam menyampaikan gagasan, pertanyaan, ataupun keluhan dan kendala yang terjadi di sebuah sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 044 Tahun 2002 menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat

dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi kegiatan pendidikan di satuan pendidikan, baik di pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah ataupun jalur pendidikan luar sekolah. Merujuk pada keputusan tersebut, komite sekolah merupakan lembaga yang merupakan perantara antara masyarakat dan pihak sekolah dalam ikut serta pada kegiatan sekolah. Komite sekolah merupakan kelompok masyarakat dan perwakilan orang tua peserta didik yang ditunjuk untuk berperan serta dalam memajukan pendidikan di satuan pendidikan.

Selanjut dengan pengertian tentang komite sekolah yang telah diputuskan sebelumnya, Saiful., (2009, p. 251) mengartikan komite sekolah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan di sekolah terutama di lingkungannya. Organisasi masyarakat yang berkomitmen dalam ikut serta memajukan pendidikan tentu akan memberikan pelayanan yang baik dalam menampung aspirasi masyarakat lainnya untuk disampaikan dan dimusyawarahkan dengan pihak sekolah. Loyalitas yang dimiliki komite sekolah akan tercermin dari keterlibatan komite sekolah dalam berperan aktif memajukan pendidikan yang ada di sekolah sekitar lingkungannya. Dengan adanya komitmen serta loyalitas, diasumsikan akan terjalin hubungan yang baik pula antara komite sekolah dan pihak sekolah dalam berdiskusi mengenai keberlangsungan kegiatan pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

Menurut Pantjastuti, (2008) komite sekolah bukanlah lembaga birokrasi baru. Komite sekolah berkedudukan sejajar dengan kepala sekolah, bukan dibawah ataupun diatas kepala sekolah. Komite sekolah tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Komite sekolah adalah badan mandiri yang menjadi penghubung antara orang tua peserta didik, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah tidak dapat diperintah ataupun menerima perintah dari kepala sekolah. Komite sekolah adalah lembaga untuk diajak bermusyawarah, komite sekolah adalah penampung aspirasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam memajukan kegiatan pendidikan. Dengan kata

lain, komite sekolah bukanlah pelaksana kegiatan pendidikan, namun komite sekolah berperan sebagai pemerhati kegiatan pendidikan.

b. Peran Komite Sekolah

Berkaitan dengan peran komite sekolah, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2013, pasal 11-14 menjelaskan peran komite sekolah adalah:

- 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan. Pemberi pertimbangan dan penentuan pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan kebutuhan sumber daya masyarakat di lingkungannya, sehingga pihak sekolah dapat mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu. Keberadaan komite sekolah juga mendorong masyarakat lainnya untuk berperan aktif menjadi pemerhati kegiatan pendidikan yang sedang terlaksana di lingkungannya. Dengan demikian, tercipta kerjasama antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan dengan baik.
- 3) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan. Memberikan masukan dan pertimbangan dapat dilakukan dengan memberikan sumbangsih berupa pemikiran, tenaga, ataupun finansial dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Teori lain yang berkenaan dengan peran komite sekolah dikemukakan oleh Mulyasa, (2003, p. 189) bahwa komite sekolah berperan sebagai (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), mediator. Adapun penjelasan secara terperinci mengenai peran komite sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*)

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) berperan dalam memberikan ide-ide dan pertimbangan bagi kemajuan sekolah. Hal ini dapat berupa identifikasi sumber daya pendidikan, ataupun dalam penetapan belanja atau anggaran belanja sekolah. Komite sekolah juga memberikan perhatian kepada keberlangsungan pendidikan seperti proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Syam, Andi Asasi., St. Syamsudduha., (2017) berpendapat bahwa peran komite sekolah adalah untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, memberikan pendapat, memberi pertimbangan dan merekomendasikan. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa komite sekolah memiliki peran yang penting dalam memajukan pendidikan yang ada di sekolah sekitar lingkungannya. Komite sekolah juga diharapkan memberikan sumbangan pikiran, dan dapat memberikan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

- 2) Komite sekolah sebagai badan pendukung kegiatan (*supporting agency*)
Sebagai pendukung kegiatan, komite sekolah memberikan perhatian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pendidikan. Komite sekolah memberikan perhatian tersebut melalui pemberdayaan sumber daya masyarakat yang ada disekitar sekolah dalam membantu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- 3) Komite sekolah sebagai badan pengawas kegiatan (*controlling agency*)
Komite sekolah sebagai pengawas kegiatan dimaksudkan kepada peran komite dalam mengawasi dan memberikan control dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hal-hal yang perlu diawasi seperti pelaksanaan program belajar mengajar, alokasi dana sekolah, serta pengawasan terhadap keluaran pendidikan di sekolah tersebut.
- 4) Komite sekolah sebagai mediator
Komite sekolah sebagai mediator merupakan penghubung antara penyelenggara pendidikan dengan masyarakat. Sebagai orang tua atau wali murid memiliki keluhan-keluhan yang dirasakan terhadap sekolah, dalam

hal ini komite sekolah berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan kedua belah pihak.

Dengan berperannya anggota masyarakat melalui komite sekolah maka akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Nurkolis (2006, p. 127) mengemukakan bahwa peran komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Komite sekolah sebagai penggerak, yaitu komite sekolah berperan dalam membentuk himpunan masyarakat untuk peduli dengan keberlangsungan pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Komite sekolah sebagai informan dan penghubung, yaitu komite sekolah berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan yang sedang berlangsung. Komite sekolah sebagai penghubung dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses pembelajaran serta kendala dan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh pihak sekolah. Dengan demikian masyarakat dan pihak sekolah saling memahami informasi yang ada tentang pendidikan dan kebutuhannya.
- 3) Komite sekolah sebagai koordinator, yaitu komite sekolah berperan dalam mengkoordinasi kepentingan sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peran sebagai koordinator penyelenggara pendidikan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga bisa mempersiapkan peserta didik dengan SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Komite sekolah sebagai pengusul, yaitu komite sekolah berperan sebagai pengusul dalam memberikan masukan dan ide-ide dalam kemajuan pendidikan di sekolah.

Merujuk pada pemaparan teori yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini, peran komite sekolah akan ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Mulyasa, (2003, p. 189) yakni peran komite sekolah terdiri dari empat peran penting, sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendorong kegiatan pendidikan, sebagai pengawas kegiatan pendidikan, dan sebagai

mediator jika ditemuinya kendala antara pihak sekolah dengan pihak lainnya seperti masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini diambil dengan pertimbangan bahwa teori mengemukakan peran komite sekolah secara terperinci dan sangat memungkinkan untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan instrumen penelitian kedepannya.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Sekolah

Komite sekolah yang merupakan lembaga pengamat dan peduli pendidikan tentu didukung dan dihambat oleh beberapa faktor. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dikemukakan oleh Pantjastuti, (2008, p. 84) faktor pendukung

- 1) Transparan, yaitu adanya keterbukaan pelaksanaan pendidikan oleh penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Dengan demikian masyarakat penuh kepercayaan dengan pihak sekolah dalam menciptakan SDM yang berkualitas melalui pendidikan di sekolah.
- 2) Akuntabel, yaitu terciptanya kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat.
- 3) Demokratis, yaitu terciptanya kebebasan menyampaikan pendapat oleh masyarakat melalui komite sekolah mengenai penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian Pantjastuti, (2008, p. 86) juga mengemukakan faktor penghalang peran komite sekolah adalah

- 1) Pemahaman, yaitu tidak semua yang menjadi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah memahami tugas dan fungsi sebagai komite sekolah.
- 2) Pembinaan, yaitu belum adanya kegiatan pembinaan bagi komite sekolah untuk meningkatkan *skill* dan kemampuan untuk bergabung menjadi komite sekolah.
- 3) Budaya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah berkembang dimasyarakat yang menghambat peran dan fungsi komite dalam menjalankan tugas.

- 4) Sosial ekonomi, yaitu keberadaan status sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak seluruhnya mendukung keberadaan komite sekolah sehingga fungsi dan kinerja komite sekolah belum seperti semestinya.

d. Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan komite sekolah berkaitan dengan orang-orang yang diperbolehkan menjadi anggota komite. Pantjastuti, (2008, p. 98) menjelaskan bahwa anggota komite sekolah adalah perwakilan orang tua dan masyarakat di lingkungan sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bahwa yang diperbolehkan menjadi anggota komite sekolah adalah:

- 1) Orang tua/ wali peserta didik yang masih aktif menempuh pendidikan di sekolah tersebut (paling banyak 50%)
- 2) Tokoh masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang berlangsung di sekitarnya (paling banyak 30%)
- 3) Pakar pendidikan, yaitu orang-orang yang memahami tentang keberlangsungan pendidikan (paling banyak 30%)

Kriteria anggota komite sekolah yang telah disebutkan harus memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat, seperti memiliki perilaku yang baik, peduli terhadap pendidikan, dan berpengalaman. Selanjutnya dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga mengatur orang-orang yang tidak boleh terlibat sebagai komite sekolah adalah:

- 1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di sekolah yang bersangkutan;
- 2) Penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
- 3) Pemerintah desa, seperti Kepala Desa dan Wali Nagari;
- 4) Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
- 5) Forum koordinasi pimpinan daerah;
- 6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 7) Pejabat pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

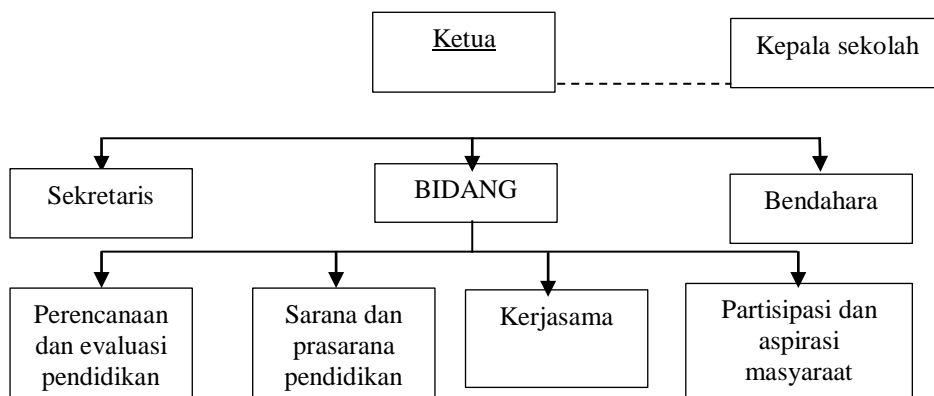
Anggota komite sekolah pada setiap satuan pendidikan berbeda antara satu dan yang lainnya. Disebutkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 tentang komite sekolah, bahwa anggota komite sekolah terdiri dari paling sedikit 5 orang dan paling banyak sebanyak 15 orang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya keanggotaan komite sekolah pada peraturan kementerian yang disebutkan maka jumlah keanggotaan komite sekolah pada jenjang SD terdiri dari 13 orang, dengan rincian perwalian orang tua peserta didik terdiri dari 6 orang, tokoh masyarakat terdiri dari 4 orang, pakar pendidikan terdiri dari 3 orang. Dalam hal ini unsur tokoh masyarakat dapat pula terdiri dari 3 orang, dan unsur pakar pendidikan terdiri dari 4 orang.

e. Struktur Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah berlandaskan kepada Undang-Undang dan Peraturan Kementrian yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U//2002 mengenai ruang lingkup, tujuan, fungsi, organisasi, dan pembentukan komite sekolah. Hasbullah, (2006, p. 98) menjelaskan bahwa pemilihan komite sekolah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis, sehingga orang-orang yang duduk pada komite sekolah benar-benar representatif wali peserta didik dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Struktur organisasi komite sekolah serta hubungannya dengan kepala sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Komite Sekolah



B. Kajian Penelitian Relevan

Beberapa penelitian relevan yang dijadikan sebagai rujukan pada penelitian ini pertama, Siregar, (2020) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah di MAN Kota Medan”. Metode penelitian korelatif yang dilakukan peneliti melibatkan guru MAN Kota Medan sebagai populasi penelitian. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal EduTech Vol. 6 No. 2 September 2020 menunjukkan hasil bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas MBS di MAN Kota Medan, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di MAN Kota Medan, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja guru terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di MAN Kota Medan, (4) terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan kinerja guru secara bersama – sama terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di MAN Kota Medan.

Kedua, Purwandari, (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Batang” pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan menerapkan korelasional ini melibatkan guru SD Negeri Kabupaten Batang sebagai populasi menunjukkan hasil penelitian (1) implementasi MBS berada pada kategori baik, kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori baik, dan peran komite dalam kategori baik pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Batang, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran komite sekolah terhadap implementasi MBS, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran komite bersama- sama dengan kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS.

Ketiga, Hasanah, (2016) “Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Wedarijaksa”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di MA se Kecamatan Wedarijaksa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, (1) mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa dapat dikatakan sudah baik, namun harus terus ditingkatkan (2) optimalisasi Komite Madrasah telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*), namun masih belum maksimal, (3) faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, hubungan kerja sama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah, dan dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah. sedangkan faktor penghambat meliputi minimalnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah, dan kurangnya independensi dan profesionalitas Komite Madrasah.

Keempat, Pasaribu, (2017) dengan judul :Implementasi MBS dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah” penelitian dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa implementasi MBS menerapkan empat prinsip yang pertama prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif manusia. Dengan penerapan prinsip MBS yang dikemukakan, maka diharapkan akan meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis.

Kelima, Nuzula, (2016) dengan judul penelitian “Peranan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Sekolah (Studi Kasus Ganda di NU Kota Mts Ma'arif dan SMA) Pendirian Islam Sunan Gunung Jati Ngunt Tulungagung)”. Penerapan penelitian kualitatif tersebut menunjukkan hasil (1) peran komite sekolah sebagai badan penasehat dalam pelaksanaan manajemen sekolah meliputi: memberikan refleksi mengenai identifikasi dan melaksanakan kebijakan pendidikan di bidang infrastruktur yang

mendukung akademik dan non-akademik, mempertimbangkan untuk mengembangkan program muatan lokal dan mempertimbangkan peningkatan kapasitas pendidikan sekolah. sumber daya; (2) Peran komite sekolah sebagai lembaga pendukung pelaksanaan manajemen sekolah meliputi: memberikan bantuan keuangan dengan mencari alternatif sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah; (3) Peran komite sekolah sebagai administrator dan supervisor: melakukan supervise terhadap kegiatan sekolah seperti pelaksanaan ujian sekolah dan pendanaan.

Keenam, Penelitian Mistrianingsih, Siti., Ali Imron., (2015), dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah” menemukan bahwa dalam penerapan MBS telah melaksanakan tujuh pilar MBS yaitu, manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen humas, dan manajemen budaya dan lingkungan sekolah.

Ketujuh, Jumiati, (2014) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” dengan hasil Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan MBS yang meliputi kepala sekolah sebagai *edukator*, *leader*, dan *motivator*. Sedangkan MBS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Manuju menunjukkan terbangunnya komitmen bersama yaitu kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan terhadap sasaran organisasi serta memberikan kewenangan berupa kepercayaan kepada guru, staf, dan stakeholder lainnya serta membangun profesionalisme kebijaksanaan sekolah dan mendistribusikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing.

Delapan, Seriyanti, Nela., Sarwani Ahmad., (2021) dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri di Kabupaten Batang” Penelitian dengan metode korelasi ini melibatkan kepala sekolah dan komite SD Negeri Kabupaten Batang dan menggunakan

angket sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) keberhasilan MBS dalam kategori sangat baik, kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori baik, peran komite sekolah dalam kategori baik, (2) terdapat pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap keberhasilan MBS sebesar 23,2%. (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap keberhasilan MBS sebesar 21,1%. (4) Ada pengaruh pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap keberhasilan MBS sebesar 41,1%.

Sembilan, Radhi'ah, Sunarto., (2021) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite, Kompetensi Guru Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah di SMK”. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian menunjukkan (1) kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Karangmojo, (2) Peran komite terbukti berpengaruh positif terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Karangmojo, (3) Kompetensi guru terbukti berpengaruh positif terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMK Karangmojo.

Kesepuluh, penelitian Febriyanti, (2019) yang berjudul “Kontribusi Kepala Sekolah terhadap Kepemimpinan Transformasional dan Peran Komite Sekolah dalam Penerapan Manajemen Sekolah di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Padang” Panjang”. Peneliti menerapkan jenis penelitian korelasional dengan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kontribusi kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah terhadap implementasi manajemen sekolah pada SMA di kota Padang Panjang adalah 10,7%, (2) Peran dewan sekolah dalam penerapan manajemen sekolah di SMP Negeri Padang Panjang adalah 11% (3) Kontribusi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap kinerja manajemen sekolah di SMP Negeri Padang Panjang adalah sebesar 16,6%.

Selanjutnya, Syam, Andi Asasi., St. Syamsudduha., (2017) dengan judul “Peranan komite sekolah sebagai lembaga penasehat dalam pelaksanaan MBS di SMA Negeri 19 Bone”. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelational. Alat pengumpul data yang digunakan adalah angket dan interview. Hasil penleitian menunjukkan bahwa komite sekolah di SMA Negeri 19 Bone sebagai media musyawarah, berfungsi sebagai komite sekolah sebagai badan penasihat dalam menentukan pelaksanaan kebijakan dalam kesatuan pendidikan yang melibatkan semua sektor, baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti orang tua dan masyarakat. Karena keterlibatan semua unsur pemerintah, orang tua, dan masyarakat akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya. Pertama, persamaan pada beberapa variable penelitian. Variable penelitian seperti kepemimpinan sekolah, komite sekolah dan Managemen berbasis sekolah juga telah dilakukan penelitiannya oleh peneliti terdahulu, namun berbeda dalam beberapa hal, seperti variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian terdahulu terdapat variabel terikat seperti efektivitas Managemen Berbasis Sekolah, mutu pendidikan, dan kinerja guru. Kedua, persamaan dan perbedaan dalam metode penelitian yaitu peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Hal ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Ketiga perbedaan dalam populasi dan sampel penelitian.

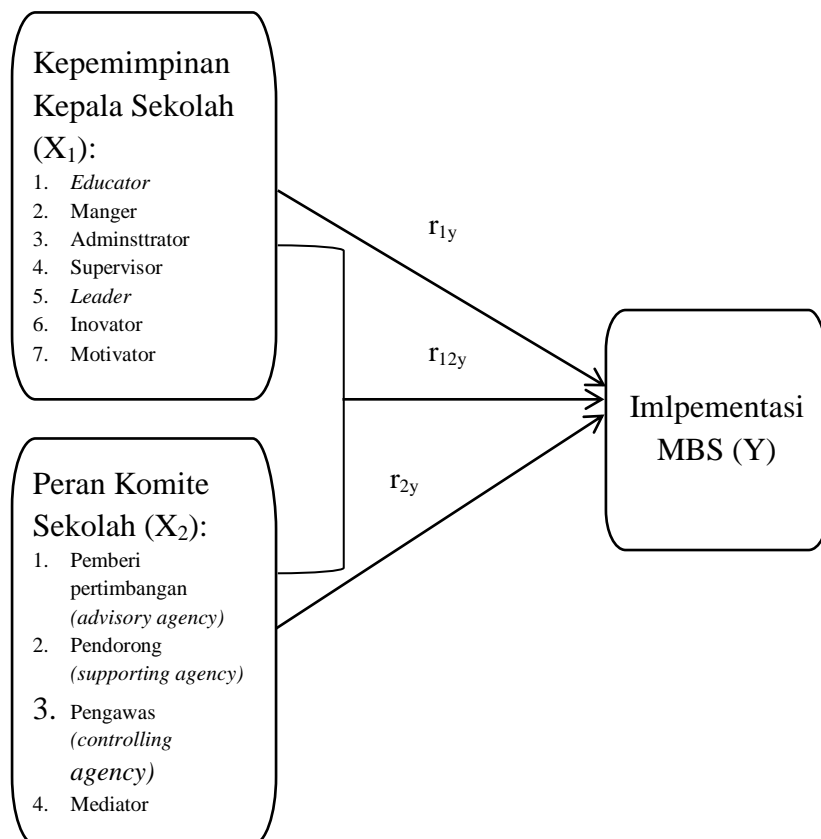
C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini diawali dengan diterapkannya MBS di SD kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, serta melihat pengaruh kepemimpinan kepala Sekolah dan Peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di sekolah. Kepemimpinan Sekolah merupakan variabel bebas (X1), dan peran komite sekolah merupakan variabel bebas (X2) yang akan dilihat pengaruhnya

terhadap implementasi MBS (Y). Pada variabel X1 komponen yang dijadikan indikator adalah evaluator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator. Pada variabel X2 komponen yang akan diteliti adalah sebagai pemberi pertimbangan, pendorong, pengawas, dan mediator. Sementara itu implementasi MBS (variabel terikat/ Y) akan dinilai dari manajemen kurikulum dan pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus.

Penelitian ini akan melihat pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Secara sederhana kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir dan teori yang telah dikemukakan, hipotesis dalam penelitian ini dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdapat pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dan terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersamaan terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *ex post facto* yaitu pencarian empirik yang sistematis, dalam penelitian ini peneliti tidak bisa mengontrol langsung variable bebas karena situasinya telah berlangsung, maka penelitian ini tidak menuntut pemberian tindakan terhadap variabel bebasnya, tapi membahas kenyataan yang telah terjadi atau pernah dilakukan oleh subjek penelitian, selanjutnya pengaruh variable bebas tersebut terhadap variable terikat tertentu. Rancangan penelitian ini adalah penelitian korelasional untuk mengetahui tingkat hubungan variable yang berbeda dalam suatu populasi, penelitian ini mencari pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan diadakan di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang. sebanyak 42 SD yang direncanakan terlaksana pada bulan Juni hingga Juli 2022. Rentang waktu ini dipertimbangkan karena banyaknya sekolah yang akan menjadi target penelitian dengan lokasi yang berbeda-beda, namun lokasi sekolah dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek/subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu, kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, Sugiyono, (2014, p. 281). Penelitian ini akan melibatkan guru SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Tahun 2022. Dengan jumlah 284 orang dari 42 SD Negeri di Kecamatan Gunung Talang. Sebaran populasi penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Besar populasi
1	SD Negeri 01 Talang	Talang	14
2	SD Negeri 02 Talang	Talang	5
3	SD Negeri 03 Cupak	Pasar Cupak	11
4	SD Negeri 04 Cupak	Sungai Rotan	7
5	SD Negeri 05 Cupak	Balai Pandan	7
6	SD Negeri 06 Guguk	Guguk	14
7	SD Negeri 07 Batang Barus	Lubuk Selasih	9
8	SD Negeri 08 Cupak	Cupak	7
9	SD Negeri 09 Sungai Jernih	Sungai Jernih	2
10	SD Negeri 10 Talang	Koto Gaek	4
11	SD Negeri 11 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	7
12	SD Negeri 12 Cupak	Balai Pandan	6
13	SD Negeri 13 Talang	Panarian	7
14	SD Negeri 14 Cupak	Sawah Taluak	6
15	SD Negeri 15 Batang Barus	Kayu Jao	7
16	SD Negeri 16 Air Tumbuk	Air Tumbuk	3
17	SD Negeri 17 Cupak	Sungai Rotan	7
18	SD Negeri 18 Batang Barus	Batang Barus	11
19	SD Negeri 20 Sukarami	Sukarami	15
20	SD Negeri 21 Cupak	Galagah	6
21	SD Negeri 22 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	6
22	SD Negeri 23 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	6
23	SD Negeri 24 Sungai Jernih	Sungai Jernih	6
24	SD Negeri 25 Talang	Talang	5
25	SD Negeri 26 Cupak	Balai Pandan	6
26	SD Negeri 27 Cupak	Guguk Jaik	6
27	SD Negeri 28 Cupak	Balai Pandan	5

28	SD Negeri 29 Cupak	Guguk Jaik	5
29	SD Negeri 30 Koto Gaek	Koto Gaek Guguk	8
30	SD Negeri 31 Batang Barus	Batang Barus	5
31	SD Negeri 32 Air Tumbuk	Air Tumbuk	7
32	SD Negeri 33 Cupak	Cupak	4
33	SD Negeri 34 Cupak	Cupak	6
34	SD Negeri 35 Cupak	Sungai Rotan	7
35	SD Negeri 36 Cupak	Balai Pandan	5
36	SD Negeri 37 Guguk	Guguk Jaik	8
37	SD Negeri 38 Koto Gaek	Koto Gaek Guguk	7
38	SD Negeri 39 Talang	Talang	6
39	SD Negeri 40 Batang Barus	Batang Barus	6
40	SD Negeri 41 Air Tumbuk	Air Tumbuk	4
41	SD Negeri 42 Air Tumbuk	Air Tumbuk	6
42	SD Negeri 43 Anau Kadok	Anau Kadok Talang	5
Jumlah			284

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, 2022)

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sugiyono, (2014, p. 118) menegaskan bahwa sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Dalam menentukan ukuran sampel, digunakan rumus Slovin (Umar, 2009, p. 78)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Ukuran Sampel

N : Jumlah populasi

e : Nilai krisis atau taraf kesalahan, dalam hal ini taraf kesalahan digunakan sebesar 10% (Sugiyono, 2014: 87), maka:

$$n = \frac{284}{1+284(0.1)^2}$$

$$n = \frac{284}{1 + 2,84}$$

$$n = \frac{284}{3,84}$$

$$n = 73,95$$

Dari hasil penghitungan sampel dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh ukuran sampel sebesar 73,95 atau dibulatkan menjadi 74 orang guru yang tersebar di 42 SD Negeri Kecamatan Gunung Talang. Karena jumlah guru pada setiap sekolah berbeda, maka besar sampel pada setiap sekolah diambil dengan menggunakan teknik *propotional random sampling* dengan menggunakan rumus:

$$\text{sampel} = \frac{n}{N} \times N_1$$

Dimana:

n : jumlah populasi menurut strata

N : jumlah populasi total

N₁ : jumlah sampel total, maka:

$$\text{sampel} = \frac{14}{284} \times 74$$

$$\text{sampel} = 0,049 \times 74$$

$$\text{sampel} = 3,64 \text{ atau dibulatkan menjadi 4.}$$

Penghitungan sampel juga berlaku untuk setiap sekolah yang menjadi populasi penelitian. Penghitungan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Ukuran Sampel Penelitian

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Besar populasi	Besar sampel
1	SD Negeri 01 Talang	Talang	14	4
2	SD Negeri 02 Talang	Talang	5	1
3	SD Negeri 03 Cupak	Pasar Cupak	11	3
4	SD Negeri 04 Cupak	Sungai Rotan	7	2
5	SD Negeri 05 Cupak	Balai Pandan	7	2

6	SD Negeri 06 Guguk	Guguk	14	4
7	SD Negeri 07 Batang Barus	Lubuk Selasih	9	2
8	SD Negeri 08 Cupak	Cupak	7	2
9	SD Negeri 09 Sungai Jernih	Sungai Jernih	2	1
10	SD Negeri 10 Talang	Koto Gaek	4	1
11	SD Negeri 11 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	7	2
12	SD Negeri 12 Cupak	Balai Pandan	6	2
13	SD Negeri 13 Talang	Panarian	7	2
14	SD Negeri 14 Cupak	Sawah Taluak	6	2
15	SD Negeri 15 Batang Barus	Kayu Jao	7	2
16	SD Negeri 16 Air Tumbuk	Air Tumbuk	3	1
17	SD Negeri 17 Cupak	Sungai Rotan	7	2
18	SD Negeri 18 Batang Barus	Batang Barus	11	3
19	SD Negeri 20 Sukarami	Sukarami	15	4
20	SD Negeri 21 Cupak	Galagah	6	2
21	SD Negeri 22 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	6	2
22	SD Negeri 23 Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	6	2
23	SD Negeri 24 Sungai Jernih	Sungai Jernih	6	2
24	SD Negeri 25 Talang	Talang	5	1
25	SD Negeri 26 Cupak	Balai Pandan	6	2
26	SD Negeri 27 Cupak	Guguk Jaik	6	2
27	SD Negeri 28 Cupak	Balai Pandan	5	1
28	SD Negeri 29 Cupak	Guguk Jaik	5	1
29	SD Negeri 30 Koto Gaek	Koto Gaek Guguk	8	2
30	SD Negeri 31 Batang Barus	Batang Barus	5	1
31	SD Negeri 32 Air Tumbuk	Air Tumbuk	7	2
32	SD Negeri 33 Cupak	Cupak	4	1
33	SD Negeri 34 Cupak	Cupak	6	2
34	SD Negeri 35 Cupak	Sungai Rotan	7	2
35	SD Negeri 36 Cupak	Balai Pandan	5	1

36	SD Negeri 37 Guguk	Guguk Jaik	8	2
37	SD Negeri 38 Koto Gaek	Koto Gaek Guguk	7	2
38	SD Negeri 39 Talang	Simpang Empat Talang	6	2
39	SD Negeri 40 Batang Barus	Batang Barus	6	2
40	SD Negeri 41 Air Tumbuk	Air Tumbuk	4	1
41	SD Negeri 42 Air Tumbuk	Air Tumbuk	6	2
42	SD Negeri 43 Anau Kadok	Anau Kadok Talang	5	1
Jumlah			284	74

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus *Slovin* maka dari 284 orang guru sebagai populasi, terpilihlah sebanyak 74 orang guru yang dijadikan sampel penelitian.

D. Pengembangan Instrumen

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket mengenai kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan implementasi MBS. Sugiyono, (2014, p. 102) menjelaskan bahwa alat ukur penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati atau dikatakan instrument. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah akan disusun berdasarkan butir-butir pertanyaan tentang kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite terhadap implementasi MBS pada sekolah penelitian.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan instrument sebelum didistribusikan kepada sampel penelitian adalah (1) mengembangkan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator, (2) membuat butir pertanyaan yang sesuai dengan pengembangan kisi-kisi pada indikator, (3) melakukan diskusi dan bimbingan kepada pembimbing, untuk mencapai kebenaran instrument yang digunakan, (4) melakukan uji coba untuk

menentukan validitas dan reliabilitas pada butir-butir pertanyaan yang disusun sebelumnya.

Kisi-kisi instrumen terdiri dari 3 variabel yaitu, kepemimpinan kepala sekolah (X_1), peran komite sekolah (X_2), dan implementasi MBS (Y). pengembangan kisi-kisi instrument dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pengembangan instrumen penelitian

Variabel dan indicator	Sub indicator	Nomor butir pertanyaan
Peran Kepala Sekolah (X_1)		1-35
a. Educator	Kepala sekolah (1) memberikan bimbingan kepada guru, (2) memberikan pelatihan, dan (3) memberikan kesempatan meningkatkan <i>skill</i> .	
b. Manager	Kepala sekolah (1) memimpin pendayagunaan sumber daya sekolah secara maksimal, (2) menetapkan tujuan dan strategi yang akan dicapai (3) memimpin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	
c. Administrator	Kepala sekolah (1) ikut serta dalam penyusunan administrasi guru, (2) ikut serta dalam penyusunan administrasi non guru (3) ikut serta dalam penyusunan administrasi peserta didik.	
d. Supervisor	Kepala sekolah (1) merencanakan program supervisi akademik, (2)	

	memeriksa RPP, silabus, dan perangkat pembelajaran lainnya, (3) melaksanakan supervisi dengan pendekatan yang tepat, (4) mengamati guru, dan (5) menindak lanjuti hasil supervisi.	
<i>e. Leader</i>	Kepala sekolah (1) menunjukkan sikap kepemimpinan, (2) membangun komunikasi yang baik.	
f. Inovator	Kepalas sekolah (1) melakukan perubahan pola pikir guru dalam memajukan sekolah, (2) bersama-sama mengembangkan kurikulum yang ada, dan (3) melakukan pembaharuan terhadap strategi proses belajar mengajar oleh guru.	
g. Motivator	Kepala sekolah (1) mendorong warga sekolah untuk maju bersama, (2) mendorong dalam pencapaian kualitas sekolah yang baik, (3) menciptakan komunitas yang dinamis antara warga sekolah dan komite sekolah.	
Peran Komite Sekolah		36-53
a. Pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>)	Komite sekolah (1) memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh kepala sekolah, (2) memberi sumbangan saran dalam keputusan yang akan	

	ditetapkan kepala sekolah, (3) memberi pertimbangan kepada guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.	
b. Pendorong (<i>supporting agency</i>)	Komite sekolah (1) mendorong kemajuan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah, (2) mendorong kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.	
c. Pengawas (<i>controlling agency</i>)	Komite sekolah (1) memberi pengawasan terhadap kegiatan sekolah, (2) meninjau keberhasilan perencanaan yang telah berjalan di sekolah.	
d. Mediator	Komite sekolah (1) sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan pihak sekolah, (2) menampung dan menyampaikan aspirasi orang tua peserta didik kepada pihak sekolah.	
Implementasi MBS		54-90
a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran	Pelaksanaan manajemen kurikulum dan program pengajaran meliputi (1) perencanaan, (2) pengembangan, (3) penilaian	
b. Manajemen tenaga kependidikan	Manajemen tenaga kependidikan meliputi (1) Perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan, (4) promosi,	

	mutasi (5) kompensasi, dan (6) penilaian.	
c. Managemen kesiswaan	Managemen kesiswaan meliputi (1) penerimaan siswa baru, (2) kelengkapan admistrasi untuk siswa.	
d. Managemen keuangan dan pembiayaan	Managemen keuangan dan pembiayaan meliputi (1) perencanaan keuangan, (2) implementasi, dan (3) evaluasi.	
e. Managemen sarana dan prasarana	Maliputi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	
f. Managemen hubungan sekolah dengan masyarakat	Meliputi kerjasama antara penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sekitar.	
g. Managemen layanan khusus	Managemen yang memberikan pelayanan diluar kegiatan pendidikan seperti layanan kesehatan dan layanan keamanan	

1. Validitas instrumen

Sugiyono, (2014, p. 121) menyatakan bahwa instrumen yang valid dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur fenomena sosial yang di teliti. Untuk itu, perlu dilakukan uji validitas instrument agar alat ukur dapat digunakan dengan baik. Beberapa uji validitas yang harus dilakukan adalah uji validitas isi (*content validity*), uji validitas konstruk (*construct validity*), dan uji validitas butir (*item validity*). Angket dengan dengan indikator kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan implementasi MBS

akan diuji melalui validitas isi dan validitas konstruk. Retnawati, (2016, p. 17) menjelaskan bahwa validitas isi merupakan analisis rasional terhadap ranah yang akan diukur, sementara validitas konstruk digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan instrument telah sesuai dengan konstruk teori. Dalam menentukan validitas isi akan dilakukan telaah fakta dan validitas konstruk akan dilakukan uji coba. Langkah-langkah dalam uji validitas ini adalah pertama pembuatan instrument dengan mengacu kepada kajian teori, kedua, hasil uji coba instrument akan dikonsultasikan kepada kedua pembimbing (*expert validity*) untuk dilakukan perbaikan seperlunya, ketiga, untuk memperoleh butir-butir yang valid dilakukan dengan mencari korelasi antara skor butir dengan skor total dengan menggunakan rumus *correlation product moment* dimana:

$$r_{xy} = \frac{(N \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Arikunto, 2010, p. 213)

r_{xy} = Coefficient correlation between X and Y class variable

N = the number of students or subject participating in the test

X = the odd item scores

Y = the even item scores

$\sum xy$ = the sum of multiple scores from each student

$\sum X$ = the sum of X

$\sum Y$ = the sum of Y

$\sum X^2$ = the sum of square in X

$\sum Y^2$ = the sum of square in Y

Berdasarkan uji coba angket yang telah didistribusikan, diperoleh bahwa terdapat item angket yang tidak valid, yaitu pada angket kepemimpinan kepala sekolah terdapat 6 item butir pertanyaan yang tidak valid dan pada butir pertanyaan MBS terdapat 2 item yang tidak valid, sedangkan pada butir pertanyaan komite sekolah, seluruh item dinyatakan valid. Secara terperinci, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4: Validitas item angket penelitian

Variabel/ indicator	sub indicator	Nomor item pertanyaan	Nomor item valid	Nomor item tidak valid
Peran Kepala Sekolah				
a. <i>Educator</i>	Kepala sekolah (1) memberikan bimbingan kepada guru, (2) memberikan pelatihan, dan (3) memberikan kesempatan meningkatkan <i>skill</i> .	1, 2, 3, 5	2, 3, 4, 5	1
b. <i>Manager</i>	Kepala sekolah (1) memimpin pendayagunaan sumber daya sekolah secara maksimal, (2) menetapkan tujuan dan strategi yang akan dicapai (3) memimpin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10	-
c. <i>Administrator</i>	Kepala sekolah (1) ikut serta dalam penyusunan administrasi guru, (2) ikut serta dalam penyusunan administrasi non guru (3) ikut serta dalam penyusunan administrasi peserta didik.	11, 12, 13, 14, 15	11, 12, 13	14, 15
d. <i>Supervisor</i>	Kepala sekolah (1) merencanakan program supervisi akademik, (2) memeriksa RPP, silabus, dan perangkat pembelajaran lainnya, (3) melaksanakan supervisi dengan pendekatan yang tepat, (4) mengamati guru, dan (5) menindak lanjuti hasil supervisi.	16, 17, 18, 19, 20	16, 17, 18, 19, 20	-
e. <i>Leader</i>	Kepala sekolah (1) menunjukkan sikap	21, 22, 23, 24, 25	21, 22, 23	24, 25

	kepemimpinan, (2) membangun komunikasi yang baik.			
f. Inovator	Kepala sekolah (1) melakukan perubahan pola pikir guru dalam memajukan sekolah, (2) bersama-sama mengembangkan kurikulum yang ada, dan (3) melakukan pembaharuan terhadap strategi proses belajar mengajar oleh guru.	26, 27, 28, 29, 30	26, 27, 28, 29	30
g. Motivator	Kepala sekolah (1) mendorong warga sekolah untuk maju bersama, (2) mendorong dalam pencapaian kualitas sekolah yang baik, (3) menciptakan komunitas yang dinamis antara warga sekolah dan komite sekolah.	31, 32, 33, 34, 35	31, 32, 33, 34, 35	-
Peran Komite Sekolah				
a. Pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>)	Komite sekolah (1) memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh kepala sekolah, (2) memberi sumbangan saran dalam keputusan yang akan ditetapkan kepala sekolah, (3) memberi pertimbangan kepada guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-
b. Pendorong (<i>supporting agency</i>)	Komite sekolah (1) mendorong kemajuan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah, (2) mendorong kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	-
c. Pengawas	Komite sekolah (1)	12, 13, 14	12, 13,	-

<i>(controlling agency)</i>	memberi pengawasan terhadap kegiatan sekolah, (2) meninjau keberhasilan perencanaan yang telah berjalan di sekolah.		14	
d. Mediator	Komite sekolah (1) sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan pihak sekolah, (2) menampung dan menyampaikan aspirasi orang tua peserta didik kepada pihak sekolah.	15, 16, 17, 18	15, 16, 17, 18	-
Implementasi Management Berbasis Sekolah				
a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran	Pelaksanaan manajemen kurikulum dan program pengajaran meliputi (1) perencanaan, (2) pengembangan, (3) penilaian	1, 2, 3, 4, 5, 6		-
b. Manajemen tenaga kependidikan	Manajemen tenaga kependidikan meliputi (1) Perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan, (4) promosi, mutasi (5) kompensasi, dan (6) penilaian.	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16	10, 12
c. Manajemen kesiswaan	Manajemen kesiswaan meliputi (1) penerimaan siswa baru, (2) kelengkapan administrasi untuk siswa.	17, 18, 19, 20, 21	17, 18, 19, 20, 21	-
d. Manajemen keuangan dan pembiayaan	Manajemen keuangan dan pembiayaan meliputi (1) perencanaan keuangan, (2) implementasi, dan (3) evaluasi.	22, 23, 24, 25, 26	22, 23, 24, 25, 26	-
e. Manajemen sarana dan prasarana	Meliputi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	27, 28, 29	27, 28, 29	-
f. Manajemen	Meliputi kerjasama	30, 31, 32	30, 31,	-

en hubungan sekolah dengan masyarakat	antara penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sekitar.		32	
g. Manajemen layanan khusus	Managemen yang memberikan pelayanan diluar kegiatan pendidikan seperti layanan kesehatan dan layanan keamanan	33, 34, 35, 36, 37	33, 34, 35, 36, 37	-

Berdasarkan uji validitas item yang telah dilakukan, variabel kepemimpinan kepala sekolah jumlah item valid sebanyak 29 butir soal, tidak valid sebanyak 6 butir soal. Variabel peran kepemimpinan kepala sekolah, jumlah item valid sebanyak 18 butir soal, item tidak valid sebanyak 0 butir soal. Variabel implementasi MBS, jumlah item valid sebanyak 35 butir soal, dan item tidak valid sebanyak 2 butir soal.

2. Reliabilitas instrument

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat konsistensi tes dalam kurun waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen akan dilakukan dengan menggunakan formula K-R 20, dimana:

$$r_{yy2} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(\frac{s^2 - \sum pq}{s^2} \right)$$

Besarnya koefisien korelasi adalah:

Tabel 3.5. Interpretasi Nilai r

Besarnya r	Interpretasi
Antara 0.800 sampai dengan 1.00	Sangat Tinggi
Antara 0.600 sampai dengan 0.800	Tinggi
Antara 0.400 sampai dengan 0.600	Cukup
Antara 0.200 sampai dengan 0.400	Rendah
Antara 0.000 sampai dengan 0.200	Sangat rendah

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas angket dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6: reability instrument penelitian

Variabel	Koofisien r	Interpretasi
Kepemimpinan kepala sekolah	0,927	Sangat tinggi
Peran komite sekolah	0,958	Sangat tinggi
MBS	0,974	Sangat tinggi

Dari penghitungan reliability intrumen yang telah dilakukan, iterpretasi reliabilitas variabel kepemimpinan kepala sekolah adalah sangat tinggi, interpretasi reliabilitas variabel peran komite sekolah adalah sangat tinggi, dan interpretasi implementasi MBS adalah sangat tinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket mengenai kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan keberhasilan MBS. Angket yang digunakan didasarkan kepada kisi-kisi yang telah dirancang menjadi indikator dan sub indikator yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi butir-butir pertanyaan. Dalam menjawab butir pertanyaan yang tertuang didalam angket mengenai kepemimpinan kepala sekolah, komite sekolah dan implementasi MBS akan disediakan 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Sering (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KD), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP).

Angket yang telah didistribusikan kepada sampel penelitian akan dianalisis dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Arikunto, (2010, p. 142) skala *likert* merupakan suatu skala pengukuran yang biasanya menggunakan alternatif jawaban. Untuk mendapatkan data mengenai intensitas prilaku maka digunakan alternatif. Untuk menjaring opini, persepsi, dan pendapat setiap alternaif jawaban angket diberi skor dari angka 1 sampai dengan angka 5.

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan regresi ganda, didalam penelitian ini akan dilihat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y) secara satu persatu, serta hubungan X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y . Untuk menentukan hubungan antar variabel digunakan penghitungan dengan bantuan SPSS versi 20.0, hasil akan dibandingkan antara nilai sig. (2-tailed) dengan nilai signifikansi. Apabila nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka terdapat pengaruh antara X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y dan X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y . Kemudian, hasil penghitungan akan dibandingkan dengan pedoman derajat hubungan pada nilai *pearson correlation* dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.7 : Nilai r

Nilai r	Interpreatsi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

1. Pengujian Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diujikan pada masing-masing variabel penelitian yaitu kepemimpinan kepala sekolah (X_1), peran komite sekolah (X_2) dan implementasi MBS (Y). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 20.0. data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai taraf signifikansi (Asym Sig 2 tailed) hitung lebih besar dari 0,05.

b. Uji linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki karakteristik linear atau tidak. Linearitas atau tidaknya variabel bebas dan terikat diketahui dengan menggunakan analisis persamaan regresi dengan pengujian linearitas yaitu

jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% maka hubungan variabel bebas dan terikat bersifat linear.

c. Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen) dan salah satu syarat analisis regresi berganda. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolenieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF dan nilai toleransinya (Tolerance value) yang terdapat dalam program SPSS 20, apabila VIF di bawah 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolenieritas.

d. Uji Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
 H_a : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
 H_a : Terdapat pengaruh peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

H_a : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data diperoleh dengan menggunakan pengembangan instrument yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas; yakni berupa angket mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan implementasi MBS. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022. Deskripsi data hasil penelitian adalah:

1. **Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang**

Kepemimpinan kepala sekolah diukur dengan mendistribusikan angket yang dikembangkan berdasarkan teori-teori para ahli. Teori tersebut dibentuk menjadi butir-butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak pernah (TP). Kemudian hasil angket yang telah diisi oleh responden diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Berdasarkan hasil analisis data, kategori iklim sekolah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Distribusi frekuensi kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Variabel	n	Kategori	Distribusi	
			f	%
Kepemimpinan Kepala Sekolah	74	Sangat baik	2	2,70
		Baik	18	24,32
		Sedang	30	40,54
		Tidak baik	22	29,73
		Sangat tidak baik	2	2,70

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang sebagian besar berada pada kategori

sedang, yaitu 40,54%. Sementara, 2,70% kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori sangat baik, 24,32% berada pada kategori baik, 29,73% berada pada kategori tidak baik, dan 2,70% berada pada kategori sangat tidak baik. Data distribusi frekuensi juga dapat dinyatakan dalam diagram sebagai berikut:

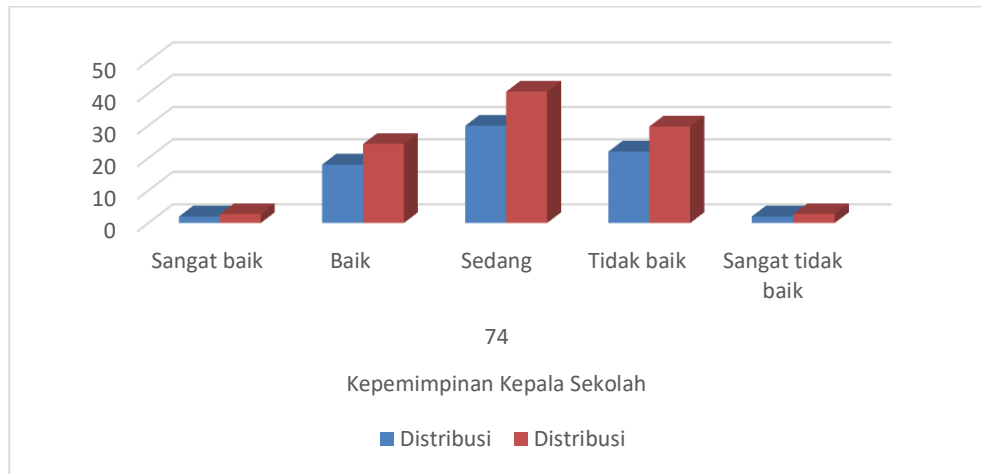


Diagram 4.1: Distribusi frekuensi kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

2. Peran komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Peran komite sekolah diukur dengan mendistribusikan angket yang dikembangkan berdasarkan teori-teori para ahli. Teori tersebut dibentuk menjadi butir-butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Kemudian hasil angket yang telah diisi oleh responden diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Berdasarkan hasil analisis data, kategori iklim sekolah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Distribusi frekuensi peran komite sekolah SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Variabel	n	Kategori	Distribusi	
			f	%
Peran Komite Sekolah	74	Sangat baik	2	2,70
		Baik	24	32,43
		Sedang	22	29,73
		Tidak baik	23	31,08
		Sangat tidak baik	3	4,05

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa peran komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang sebagian besar berada pada kategori baik, yaitu 32,43%. Sementara, 2,70% peran komite sekolah berada pada kategori sangat baik, 29,73% berada pada kategori sedang, 31,08% berada pada kategori tidak baik, 4,05% berada pada kategori sangat tidak baik. Data distribusi frekuensi juga dapat dinyatakan dalam diagram sebagai berikut:

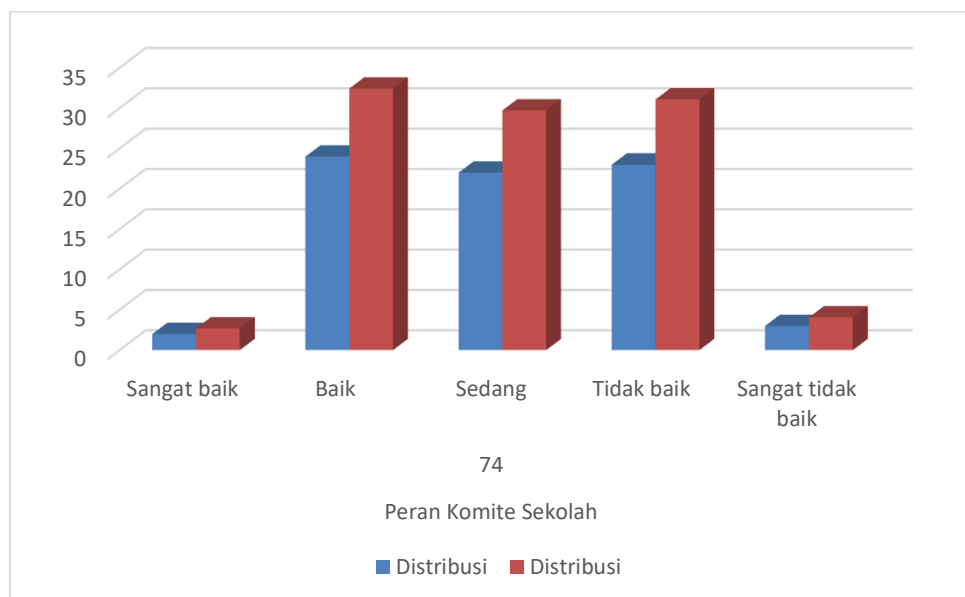


Diagram 4.2 : Distribusi frekuensi peran komite sekolah di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

3. Implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Implementasi MBS diukur dengan mendistribusikan angket yang dikembangkan berdasarkan teori-teori para ahli. Teori tersebut dibentuk menjadi butir-butir pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Kemudian hasil angket yang telah diisi oleh responden diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Berdasarkan hasil analisis data, kategori iklim sekolah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Distribusi frekuensi peran komite sekolah SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Variabel	n	Kategori	Distribusi	
			f	%
Implementasi MBS	74	Sangat baik	6	8,11
		Baik	13	17,57
		Sedang	23	31,08
		Tidak baik	4	5,41
		Sangat tidak baik	4	5,41

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang sebagian besar berada pada kategori sedang, yaitu 31,08%. Sementara, 8,11% peran komite sekolah berada pada kategori sangat baik, 17,57% berada pada kategori baik, 5,41% berada pada kategori tidak baik, 5,41% berada pada kategori tidak baik. Data distribusi frekuensi juga dapat dinyatakan dalam diagram sebagai berikut:

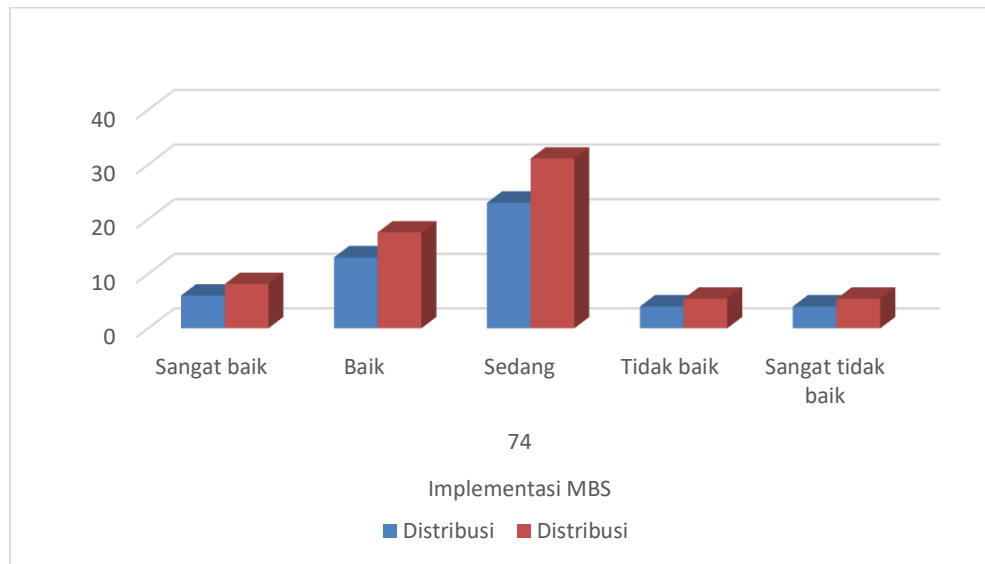


Diagram 4.3 : Distribusi frekuensi implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas diujikan pada setiap variabel yaitu kepemimpinan kepala sekolah (X_1), peran komite sekolah (X_2) dan implementasi MBS (Y). Pada pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai taraf signifikansi (Asym Sig 2 tailed) hitung lebih besar dari 0,05. Uji normalitas terhadap ketiga variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Uji normalitas

Variabel	n	Sig hitung	Sig	Ket
Kepemimpinan kepala sekolah (X_1)	74	0,15	0,05	Normal
Peran komite sekolah (X_2)	74	0,60	0,05	Normal
Implementasi MBS (Y)	74	0,91	0,05	Normal

Dari hasil uji normalitas variabel penelitian dengan menggunakan metode *one sample kolmogrov smirnov* dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki karakteristik linear atau tidak. Linearitas atau tidaknya variabel bebas dan terikat diketahui dengan menggunakan analisis persamaan regresi dengan pengujian linearitas yaitu jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% maka hubungan variabel bebas dan terikat bersifat linear. Rangkuman hasil uji linearitas dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Uji linearitas

X dengan Y	F_{hitung}	F_{tabel}	Ket
X_1 dengan Y	2,24	2,41	Linear
X_2 dengan Y	2,35	2,41	Linear

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa harga F_{hitung} untuk masing-masing variabel lebih kecil dari harga F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, sehingga hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dengan implementasi MBS adalah linear.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen) dan salah satu syarat analisis regresi berganda. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolenieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF dan nilai toleransinya (Tolerance value) yang terdapat dalam program SPSS 20, apabila VIF di bawah 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolenieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Uji multikololinearitas

Variabel	VIF	Ket
X ₁	1,90	VIF<10 tidak terjadi multikolinearitas
X ₂	1,90	VIF<10 tidak terjadi multikolinearitas

Hasil pengujian statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki VIF di bawah 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolenieritas pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi, sehingga data dapat digunakan untuk melanjutkan analisis regresi.

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Kepemimpinan kepala sekolah adalah salah satu faktor (X_1) yang diujikan dalam penelitian. Pengujian hipotesis antara pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS adalah H_0 diterima apabila silai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. H_a di terima apabila nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20.0, hasil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 : Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS

Variabel	Signifikansi (sig. 2-tailed)	R	Interpretasi
X ₁ terhadap Y	0,031	0,522	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada kategori sedang

Pada tabel 4.7 telah dilakukan pengujian untuk menentukan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS, maka dapat dilihat bahwa terdapat kontribusi antara kedua variabel yang dibuktikan dengan nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0,031 sehingga diketahui bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,031 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada nilai *pearson correlation* diperoleh nilai R adalah 0,522, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh yang dimiliki oleh kedua variabel berada pada kategori sedang.

2. Pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Peran komite sekolah adalah faktor selanjutnya (X_2) yang diujikan dalam penelitian. Pengujian hipotesis antara peran komite sekolah terhadap implementasi MBS adalah H_0 diterima apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka tidak terdapat pengaruh peran komite sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. H_a di terima apabila nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka terdapat pengaruh peran komite sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y) SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20.0, hasil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS

Variabel	Signifikansi (sig. 2-tailed)	R	Interpretasi
X ₂ terhadap Y	0,017	0,532	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada kategori sedang

Pada tabel 4.8 telah dilakukan pengujian untuk menentukan pengaruh peran komite sekolah (X₂) terhadap implementasi MBS (Y), maka dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara kedua variabel yang dibuktikan dengan nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0,017 sehingga diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,05 (0,017<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima. Pada nilai *pearson correlation* diperoleh nilai R adalah 0,532, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh yang dimiliki oleh kedua variabel berada pada kategori sedang.

3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implemementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Uji hipotesis selanjutnya adalah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X₁) dan peran komite sekolah (X₂) terhadap implementasi MBS (Y). H₀ diterima apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05 (p>0,05), maka tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X₁) dan peran komite sekolah (X₂) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. H_a di terima apabila nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), maka terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X₁) dan peran komite sekolah (X₂) terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20.0 diperoleh hasil seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 : Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS

Variabel	Signifikansi (sig. 2-tailed)	R	Interpretasi
X ₁ dan X ₂ terhadap Y	0,000	0,574	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada kategori sedang

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,000 yang berarti terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X₁) dan peran komite (X₂) sekolah terhadap implementasi MBS (Y). Dengan kata lain H₀ ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan penghitungan yang ditunjukkan oleh *pearson correlation* nilai R adalah 0,574, Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan terikat berada pada kategori sedang.

D. Pembahasan

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Managemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam memberikan wewenang kepada sekolah dalam menentukan keputusan. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya otonomi daerah sehingga sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan wilayah setempat dan kearifan lokal dengan sumber daya manusia. Tujuan penerapan MBS seperti yang disampaikan oleh Nurkolis, (2006, p. 23) bahwa tujuan diterapkannya MBS adalah dalam rangka mencapai pembelajaran yang berkualitas ditinjau dari pelaksanaan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dilihat dari penyelenggara pendidikan yang terlibat didalamnya, salah satunya adalah kepemimpinan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh melalui uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistic regresi linear berganda. Pada perolehan data diketahui bahwa nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$ ($0,031 < 0,05$), yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap implementasi MBS (Y). Pada nilai *pearson correlation* menunjukkan nilai R adalah 0,574 yang berarti bahwa hubungan kedua variabel berada pada kategori sedang. Dengan artian bahwa keberhasilan implementasi MBS tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan kepala sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi MBS tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, semakin baik pula implementasi MBS di sekolah tersebut.

Peran kepala sekolah adalah sebagai pemimpin yang akan melaksanakan kegiatan, mengambil kebijakan, dan meninjau pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Mulyasa, (2017, p. 126) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan implementasi MBS, kepala sekolah memiliki beberapa kriteria seperti disiplin, menjaga hubungan harmonis, mampu bekerja dengan tim, dan mewujudkan tujuan sekolah. Sebelumnya, Mulyasa, (2003, p. 98) menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kompetensi sebagai *educator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *innovator*, dan *motivator* yang akan mengendalikan kegiatan pendidikan pada sekolah yang dipimpin. Dari berbagai peran yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dapat dikatakan bahwa salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi MBS adalah kepemimpinan kepala sekolah, sejalan dengan yang disampaikan Suhardan (dalam Suprihatin, 2017) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah salah satu indikator keberhasilan implementasi MBS.

Merujuk pada penelitian terdahulu tentang kepemimpinan kepala sekolah dan implementasi MBS telah membuktikan bahwa terdapat

hubungan kedua variabel. Siregar, (2020) melalui penelitiannya yang telah dipublikasi dalam jurnal *EduTech* Vol 6 No. 2 September 2020 membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan implementasi MBS di MAN Kota Medan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Purwandari, (2011) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap implementasi MBS pada SD Negeri Kabupaten Batang. Pada penelitian relevan yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran kepala sekolah mempengaruhi keberhasilan implementasi MBS. Pada pelaksanaannya MBS memerlukan penyelenggara yang mampu mengatur kegiatan dengan tepat seperti pada bagian manajemen kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Kesemua indikator dalam implementasi MBS membutuhkan kepemimpinan yang mampu meninjau, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan implementasi MBS yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan kepala sekolah dikatakan berpengaruh terhadap implementasi MBS dapat dilihat dari peran yang sangat berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Sebagai *educator*, kepala sekolah merupakan *role model* dalam meningkatkan kemajuan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah mampu berinovasi untuk keberhasilan implementasi MBS, menciptakan ide-ide baru, menerapkan strategi dalam pencapaian keberhasilan MBS, seperti yang disampaikan Luhans, (2006, p. 644) bahwa kepala sekolah harus memiliki integritas, intelegensi, pengetahuan, dan kecerdasan emosi dalam mengelola sekolah. Keterkaitan kepemimpinan kepala sekolah dan implementasi MBS menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, semakin baik pula implementasi MBS yang ada di sekolah tersebut.

2. Pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Hal lain yang mempengaruhi implementasi MBS adalah kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional juga telah disampaikan bahwa salah satu komponen implementasi MBS adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah perwakilan yang memenuhi kriteria serta ditunjuk dan dibentuk dalam sebuah lembaga yang disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah merupakan perwakilan yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah. Komite sekolah berperan sebagai pemberi masukan/ pertimbangan, pemberi dukungan, pengontrol, dan mediator harus menjalankan perannya dengan baik agar tercipta komunikasi yang baik dengan pihak sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran komite sekolah terhadap implementasi MBS diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Hal ini didukung dengan perolehan data melalui uji *hopetsis* yang dianalisis dengan menggunakan *statistic regresi berganda* bahwa nilai *sig. (2-tailed) < 0,05 (0,17<0,05)*. Dari perolehan data, diketahui H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan, terdapat pengaruh peran komite sekolah (X_2) terhadap implementasi MBS (Y). Pada nilai *pearson correlation* nilai R menunjukkan angka 0,574 yang diinterpretasikan hubungan yang dimiliki kedua variabel adalah sedang. Makna yang dapat ditarik dari nilai yang diperoleh adalah bahwa implementasi MBS tergantung baik buruknya peran komite sekolah yang ada di sekolah tersebut. Semakin baik peran komite sekolah, semakin baik pula implementasi MBS di sekolah tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian diatas, Seriyanti, Nela., Sarwani Ahmad., (2021) melalui temuan penelitiannya telah membuktikan bahwa

komite sekolah memberi dampak secara parsial terhadap keberlangsungan MBS di sekolah. Pihak sekolah tidak dapat mengambil keputusan sepihak terhadap keberlangsungan pendidikan yang berjalan di sekolah karena terdapat peran komite sebagai pengontrol yang akan meninjau kegiatan penyelenggara pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Syam, Andi Asasi., St. Syamsudduha., (2017) mengenai peran komite sekolah sebagai lembaga penasehat dalam pelaksanaan MBS telah membuktikan bahwa komite sekolah di SMA Negeri 19 Bone sebagai media musyawarah, berfungsi sebagai komite sekolah sebagai badan penasihat dalam menentukan pelaksanaan kebijakan dalam kesatuan pendidikan yang melibatkan semua sektor, baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti orang tua dan masyarakat. Karena keterlibatan semua unsur pemerintah, orang tua, dan masyarakat akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Meninjau tentang peran komite sekolah yang telah dirumuskan oleh Mulyasa, (2003, p. 189) bahwa komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan mediator. Hal ini berarti bahwa peran komite sekolah tidak terlepas dari implementasi MBS. Dalam implementasi MBS salah satu manajemen yang harus dilaksanakan adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini, komite sekolah telah menunjukkan perannya sebagai mediator antara pihak sekolah dan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah haruslah dimusyawarahkan dengan komite sekolah. Kebijakan tersebut akan dipertimbangkan baik dan buruknya. Apabila kebijakan yang dirumuskan menguntungkan bagi pelaksanaan pendidikan serta penggunaannya, maka komite sekolah akan mendukung kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya, komite sekolah akan memberikan kontrol terhadap kegiatan yang dilaksanakan agar tujuan implementasi MBS dapat tercapai dengan baik.

3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang

Secara bersama-sama kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah mempengaruhi implementasi MBS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) dan peran komite sekolah (X_2) secara bersama-sama terhadap implementasi MBS (Y) di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Hal ini telah melalui uji hipotesis dengan menggunakan statistic regresi linear berganda, diperoleh nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan nilai *pearson correlation* nilai R berada pada rentang 0,574 yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas dan terikat berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama dengan peran komite sekolah memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Semakin baik kepemimpinan kepala sekolah dan semakin baik peran komite sekolah maka semakin baik pula implementasi MBS yang diterapkan di sekolah. Penerapan MBS yang mengatur pengelolaan kurikulum, kepegawaian, dan kesiswaan tentu tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang berperan sebagai *educator*, *leader*, *supervisor*, dan *administrator*. Implementasi MBS yang ditinjau dari hubungan sekolah dan masyarakat serta adanya layanan khusus berkaitan erat dengan peran komite sekolah yang berperan sebagai pemberi masukan, pendorong, pengontrol, dan sebagai mediator dalam kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut, penelitian relevan terdahulu juga membuktikan hal serupa, Radhi'ah, Sunarto., (2021) melalui penelitian korelasional membuktikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah berpengaruh positif terhadap

keberhasilan MBS di SMK Karangmojo. Dengan kata lain kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah memberi kontribusi terhadap keberhasilan dalam implementasi MBS di sekolah. Keberhasilan MBS tidak hanya didasarkan oleh faktor internal seperti kepemimpinan kepala sekolah, namun juga faktor lain yang datang dari luar, seperti peran komite sekolah yang merupakan perwakilan masyarakat dan wali murid peserta didik di sekolah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Seriyanti, Nela, Syarwani Ahmad, (2021) juga membuktikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama dengan peran komite sekolah memberi pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keberhasilan MBS yang diterapkan di SD Negeri Kabupaten Batang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah merupakan faktor penentu dalam pencapaian keberhasilan implementasi MBS. Jika kedua faktor tersebut tidak berjalan dengan baik akan berimbas pada tidak tercapainya keberhasilan implementasi MBS. Implementasi MBS yang tidak tercapai akan menurunkan kualitas pendidikan yang berlangsung di sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 42 SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang melibatkan sebanyak 74 orang guru sebagai sampel penelitian, dengan menyebar angket sebagai alat pengumpul data, dan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0 untuk mengolah data sehingga didapat hasil pengolahan, pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dengan nilai signifikan sebesar $0,031 < 0,05$ yang menyatakan H_a diterima dan H_0 ditolak. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara peran komite sekolah dan implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan nilai signifikan sebesar $0,017 < 0,05$ yang menyatakan H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah merupakan dua faktor yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi MBS di SD Negeri Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta fakta yang ada, penelitian ini diharapkan nantinya berkontribusi terhadap implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, maka dari itu peneulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah diharapkan mampu memanfaatkan kewenangan yang diperolehnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mutu sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus sebagai contoh teladan bagi warga sekolah dan masyarakat, serta memberdayakan guru secara berkisanmbungan serta memberikan motivasi untuk keberhasilan MBS.
2. Bagi komite sekolah hendaknya melaksanakan perannya sebagai: pemberi pertimbangan, pendorong, pengawas, mediator dengan sungguh-sungguh

sehungan terjadi kemitraan yang harmonis dengan berbagi pihak dalam meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan.

3. Bagi penyelenggara pendidikan sebagai sumbangan pemikiran begitu berperannya kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu sekolah daalm menciptakan komitmen serta profesionlitas agar terwujud “warga sekolah” yang memiliki perhatian terhadap peningkata mutu sekolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Melton Putra.
- Asmendri, & Ri, S. ag. M. P. (2021). *Melejitkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah*.
- Febriyanti, A. (2019). *Kontribusi Kepala Sekolah terhadap Kepemimpinan Transformasional dan Peran Komite Sekolah dalam Penerapan Manajemen Sekolah di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Padang Panjang*. Universitas Negeri Padang.
- Hasanah, N. (2016). *Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa*.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Jumiati. (2014). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dasar dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah dasar kecamatan manuju kabupaten gowa*. universitas Muhammadiyah Makassar.
- Luhans, F. (2006). *Organizational Behaviour*. ANDI.
- Machali, Imam dan Hidayat, A. (2016). *The Handbook of Education Management*. Kencana Prenada Media.
- Mulyasa, E. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Managemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkolis. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: teori, model, dan aplikasi*. Grasindo.
- Nuzula, W. F. (2016). *Peran Komite Sekolah dalam mplementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Multi Kasus Di Mts Ma'arif NU Kota*

Blitar dan SMP slam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung)".
UIN SATU Tulungagung.

- Pantjastuti, S. R. (2008). *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Hikayat Publishing.
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Managemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah. *Jurnal EduTech*, 3(1).
- Patras, Yuyun Elizabeth, Iqbal, Agus, Papat, R. Y. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidkan Melalui Kebijakan Managemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya. *Jurnal Managemen Pendidikan*, 7(2).
- Priansa, D. J. (2017). *Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional*. Pustaka Setia.
- Purwandari, E. (2011). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Efektivitas Managemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Batang*. Universitas Terbuka.
- Retnawati, H. (2016). *Analisis Kuantitatif Intrumen Penelitian: Panduan Peneliti, Mahasiswa, dam Psikometrian*. Parama Publishing.
- Rohiat. (2010). Managemen Sekolah: Pengelolaan dalam Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini. *JMKSP; Jurnal Managemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 2(1).
- S.P, H. M. (n.d.). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara.
- Saiful., S. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Seriyanti, Nela, Syarwani Ahmad, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 6(1).
- Seriyanti, Nela., Sarwani Ahmad., D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap keberhasilan Managemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Managemen Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan*, 6(1).
- Siregar, G. G. S. (n.d.). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Managemen Berbasis Sekolah di MAN Kota Medan. *Jurnal EduTech*, 6(2).

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suprihatin, B. (2017). Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Sahara Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Enterprenourship*, 11(2).
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan dan Konseling Sekolah*. Kencana.
- Syam, Andi Asasi., St. Syamsudduha., M. K. M. (2017). Peran Komite Sekolah sebagai Advisor Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 19 Bone. *Jurnal Diskursus Islam*, 05(3).
- Umar. (2009). *Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Wahjosumidho. (2005). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Raja Grafindo Persada.